bhinneka

karena Indonesia tidak tunggal ika

EDISI MEI 2012

NEGARA SEKULER

bhinneka
karena Indonesia tidak tunggal ika

BY

NEGARA SEKULER

Soe Tjen Marching

Pada senja 14 Juli 1942, lelaki tirus dengan secarik kain penutup tubuh, menyusuri tanah yang kerontang berdebu. Mereka yang tak mengenalnya akan menyangka lelaki ini sebagai gembel peminta-minta. Namun, "gembel" bernama Mahatma Gandhi ini tidak sedang meminta-minta. Dia baru saja memutuskan sesuatu yang akan mengguncangkan dunia. Bersama dengan Kongres Nasional India, ia meluncurkan dekrit yang mendesak pemerintah Inggris untuk segera keluar dari tanah itu.

India akan memerintah Negaranya sendiri, dan Gandhi merencanakan suatu sistem bagi Bangsa ini, untuk menentang kolonialisme: pemerintahan sekuler.

"

Sekulerisme dalam Negara secara umum dikenal sebagai sistem pemerintahan yang memisahkan agama dari politik dan kenegaraan. Inilah yang menakutkan bagi beberapa orang: bila tidak ada lagi agama yang dipegang oleh penguasa, apa yang akan mengarahkan nurani mereka?

Agama adalah untuk membuat manusia lebih manusiawi, demi kebaikan, sebuah pegangan untuk moralitas manusia. Namun, agama di tangan para pejabat telah terbukti disalahgunakan untuk semakin membohongi rakyat. Begitu pula di Indonesia. Kekerasan atas nama agama masih berlanjut. Pertempuran antar agama dibiarkan, terkadang dengan membela agama mayoritas, untuk memperoleh kepopuleran.

Pemerintah telah menggunakannya untuk ajang adu domba. Justru karena
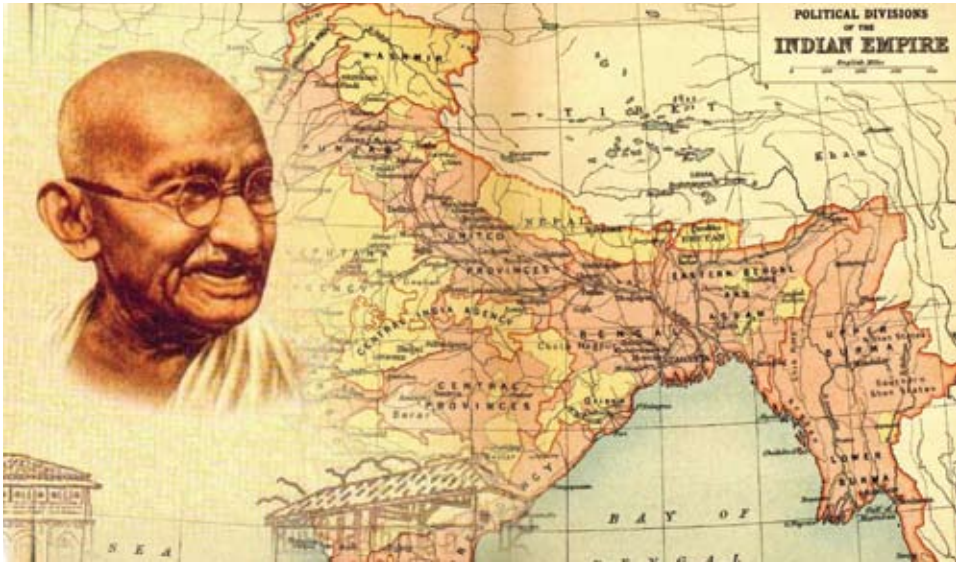
keyakinan bahwa apa saja yang menyangkut agama itu benar dan selalu baik, kebanyakan masyarakat buta. Agama bisa menjadi vitamin atau racun, tergantung dari siapa yang menyandangnya.

Dan sekali lagi, kecurigaan bahwa sekulerisme hanyalah pengaruh Barat? Mahatma Gandhi, seorang Hindu yang taat beribadah, telah mengenali muslihat agama dalam politik. Justru dengan sekulerisme, dia melawan dominasi Negara Inggris (yang dikenal sebagai “Barat” oleh kebanyakan orang).

Ia tahu, betapa mudahnya agama bisa dijadikan bulu-bulu domba bagi para serigala politik. Ucapnya: “Simpanlah agama untuk kehidupan pribadimu. . . Kita sudah cukup menderita dengan campur tangan agama atau Gereja di bawah pemerintahan Inggris. Sebuah masyarakat, yang kehidupan agamanya tergantung pada Negara, sungguhlah tidak layak mempunyai agama. . .”

Hubungan *CINTA BEDA AGAMA* mungkinkah ?

Laporan Diskusi Bhinneka di Bandung
Oleh Shinta Miranda & Soe Tjen Marching

Ketika ditanya "Apakah boleh menikah dengan yang berbeda agama?", Gus Dur menjawab:

> ***"Tentu saja boleh. Karena yang melarang adalah mereka yang mengajinya belum khatam, baru sampai ke al-Bhaqarah, belum memahami al-Maidah"***

Hubungan cinta beda agama bisa terjadi pada siapa saja. Ada yang merasa tidak terganggu oleh hal ini, tapi banyak juga yang tidak setuju dan bahkan menentangnya. Alasannya bermacam-macam, ada yang berkata nikah beda agama itu tidak baik bagi iman, bahkan ada yang percaya bahwa hal ini dosa. Salah satu jalan tengah yang diambil oleh beberapa pasangan adalah pindah agama.

Misalnya, Maria yang beragama Kristen akhirnya memutuskan untuk pindah ke agama Islam, sebelum menikah dengan Eko. Maria mencoba menjadi Muslimah yang baik, tapi tidak disangkal bahwa ia rindu sekali akan perayaan Natal dan lonceng

Gereja. Ia juga rindu kidung-kidung yang didengarnya sewaktu kanak-kanak. Tapi, ia takut kalau mendengarkannya atau kembali ke Gereja, keluarga Eko akan mencelanya tidak sungguh-sungguh sebagai seorang Muslimah. Jadi, ia menyimpan kegalauan ini di hati saja.

Beda lagi dengan kisah Linda yang Katolik dan Budi yang Islam. Si lelaki yang akhirnya menjadi Katolik, setelah terjadi tawar-menawar yang cukup lama. Budi mengaku sedikit berat hati dengan pindah agama, tapi dilakukannya demi cinta.

Tidak semua pasangan memutuskan seperti yang dilakukan kedua pasangan yang telah disebut di atas ini. Beberapa pasangan memilih untuk tetap berpegang pada agamanya masing-masing. Namun, secara hukum di Indonesia, pernikahan seperti ini tidak bisa disahkan oleh Negara. Jadi, pada surat nikah seringkali mereka menyatakan mempunyai agama yang sama, sekedar untuk mendapat formulir resmi dari Negara.

Cinta yang kandas karena beda agama ini juga cukup banyak. Pasangan selebritis Christine Hakim dan Broery Pesolima (Marantika) harus terputus hubungan kasihnya karena mereka berbeda agama. Begitu juga, Dewi Persik sempat dikabarkan putus hubungan dengan kekasihnya karena beda agama. Terkadang campur tangan orang tua juga sangat berpengaruh dalam hal ini.

Berbagai kisah inilah yang mendorong lembaga Bhinneka untuk mengadakan diskusi tentang hubungan cinta ini. Pada 19 Febuari, lembaga Bhinneka Bandung dan Jabotabek berkerja sama dengan Komunitas Jaka Tarub mengadakan diskusi tentang "Hubungan beda agama: Mungkinkah?" Narasumber dari diskusi ini adalah Ahmad Nurcholish, Pendeta Albertus Patty dan Nurrochman.

Hubungan Beda Agama Dalam Islam

1. Ahmad Nurcholish:

Ahmad Nurcholish memimpin sebuah lembaga yang bernama Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Fakultas Tarbiyah dan Pondok Pesantren Al Faqih, Semarang. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain: Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama, Pernikahan Beda Agama (Merupakan Riset dengan Komnas HAM) dan Menjawab Masalah Nikah Beda Agama.

Menurut Ahmad Nurcholish, dalam perbedaan tafsir Islam, ada yang menganggap dengan agama Kristen dan Yahudi (Ahlul Kitab) diperbolehkan (al-Maidah 5 ayat 5), sementara pelarangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik ada dirujuk di al-Baqarah 2 ayat 221, al-Mumtahanah 60 ayat 10, sementara al-mumtahanah 60 ayat 10 menjelaskan tentang pelarangan menikah dengan orang-orang kafir.

Namun, apakah sama antara musyirk, kafir dan Ahlul Kitab? Para ulama tafsir berbeda pendapat, ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Sebagian besar membedakannya, sebab dalam bahasa Arab tiga kosa kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Musyrik dipahami sebagai mereka yang menyekutukan Tuhan, Kafir dilabelkan kepada mereka yang tidak ber-

"Islam", Ahlul Kitab diidentikan dengan penganut Yahudi dan Nasrani.

"Saya termasuk orang yang membedakan atara musyrik, kafir dan Ahlul Kitab, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam memaknai ahl al kitab, yakni meliputi semua pemeluk agama, asal mereka percaya kepada satu Tuhan, hari akhir dan berbuat baik," begitu dikatakan Bpk. A.Nurcholish.

Hal seperti ini sangat kurang disosialisasikan. Hal-hal yang telah dilupakan oleh umat Islam sendiri adalah :

- *Tiga putri Nabi pun menikah dengan non muslim, Yasser Arafat menikah dengan isterinya yang Katolik Koptik tanpa membebani istrinya untuk masuk Islam dan sebaliknya.*
- *Fatwa MUI tentang pelarangan nikah beda agama adalah merupakan persepsi sendiri (opini MUI).*
- *Ketika ada yang bertanya: "Apakah boleh menikah dengan yang berbeda agama?", Gus Dur menjawab: "Tentu saja boleh. Karena yang melarang adalah mereka yang mengajinya belum khatam, baru sampai ke al-Bhaqarah, belum memahami al-Maidah".Kendala yang terjadi pada orang tua adalah seringnya mereka mendengar apa kata agamawan yang tidak menekankan agama sebagai cinta kasih, tapi sebagai dogma. Begitu juga, kendala dari oknum penyelenggara negara dari tingkatan RT, RT, Lurah, Camat sampai kepada Catatan Sipil, yang gemar memamerkan kekuasaannya. Sedang KUA belum ada yang mau menikahkan pasangan beda agama karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Inpres no.1 tahun 1991.*

2. Nurrochman:

Pembicara kedua adalah pak Nurrochman, seorang dosen di UIN, Fakultas Syariah dan Hukum Pernikahan dari sisi hukum dan agama. Pak Nurrochman berpend apat, bahwa kekhawatiran, kebingungan akan pernikahan sebenarnya bukan urusan Negara. Pernikahan atau hubungan cinta adalah hak pribadi. Pada hakikatnya Negara hanya melindungi, bukan menc ampuri.

Dari banyaknya kendala yang ada, para pelaku harus membuktikan apakah

Salah satu akibat politik pemerintah adalah manipulasi agama. Agama menjadi alat pemecah belah yang ampuh, sehingga orang yang saling mencintai pun bertikai karena agama. Negara tidak melindungi, tapi justru mengadu domba rakyatnya.

NBA tersebut dapat dikelola dengan baik untuk masa depan mereka. Sebenarnya, ada kaidah yang dianggap sebagai: segala sesuatu boleh sepanjang tidak ada nas. Tapi ada juga kaidah lain: segala sesuatu itu dilarang, seperti di al-Baqarah 21 yang mengatakan: Laki-laki menuntut ilmu. Apakah perempuan dilarang?

Dari sinilah ada perbedaan tafsir antara nikah beda agama juga muncul.

Pembicara ketiga adalah Pendeta Albertus Patty Gembala di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Bandung. Beliau menyelesaikan S1 di STT Jakarta, Master di Indiana University, dan Doctor di Pittsburg Theology University. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain: Theology of Dialog, Permainan Untuk Segala Usia dan Terbit Sepucuk Tarub.

Nikah Beda Agama Menurut Pendeta Kristen

Menurut Pendeta Albertus Patty nikah beda agama di dalam Gereja Kristen seringkali tergantung pada gereja itu sendiri. Ada berbagai kebijakan dari pemimpin Gereja (dalam hal ini Gereja Protestan) dan tergantung dari juga sangat tergantung pada sikap orang tua. Bila pemimpin gereja dan orang tua konservatif atau fundamentalis, akan tidak dimungkinkah pernikahan beda agama bisa terjadi. Umumnya mereka menyitir sebuah ayat dari 2 Korintus 6:14 (Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap?).

Namun, apakah yang dimaksud dengan “orang yang tidak percaya“? Tidak percaya kepada apa? Dan bukankah Yesus mengajarkan untuk mencintai sesama tanpa diskriminasi apapun?

Seringkali catatan sipil juga mempersulit bila ada perbedaan agama antar pasangan, sehingga beberapa pasangan beda agama harus melakukan pernikahan di Singapura, Australia atau Thailand. Di Gereja yang dipimpin Pendeta Albertus Patty dapat dilakukan pemberkatan pernikahan beda agama tanpa membaptis pasangan yang non-Kristen.

PENUTUP

Inilah salah satu akibat campur tangan pemerintah dan para politikus yang gemar memanipulasi rakyatnya. Agama menjadi alat pemecah belah yang ampuh, sehingga orang yang saling mencintai pun bertikai karena agama.

Negara tidak melindungi, tapi justru mengadu domba rakyatnya. Sayang, banyak rakyat yang juga tidak menyadari. Bila agama adalah untuk kebaikan dan kedamaian manusia, mengapa harus ada pertengkaran karena beda agama?

NEGARA dan KERUKUNAN BERAGAMA

Marcel Hizkia Sutanto

Sekulerisme seringkali dihubungkan dengan ateisme dan peniadaan agama. Inilah yang seringkali membuat banyak orang di Indonesia menolak, bahkan anti terhadap kata sekulerisme, karena mereka merasa bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah mereka yang beragama. Bahkan, agama seringkali dianggap sebagai jati diri bangsa Indonesia. Tapi, apakah benar negara/pemerintahan sekuler adalah sesuatu yang bisa "mengancam" atau "mengkontradiksi" jati diri bangsa Indonesia? Apakah hubungan sekulerisme dan ateisme itu benar?

Seringkali istilah "negara sekuler" ini mirip ketakutan akan kucing dalam karung. Kita tidak tahu kucing tersebut akan mencakar atau justru amat manis, tapi kita sudah ketakutan sebelum membuka karung dan melihat kucingnya. Karena itu, mari kita teliti satu-persatu, dengan mengadakan perjalanan kata, sehingga "negara sekuler" tidak lagi membuat bulu kuduk berdiri tanpa tahu sebenarnya apa maksudnya. Mari kita buka "karung-karung" yang menyelubungi kata ini.

Sekulerisme

Kita mulai dari definisi "sekulerisme" dulu. Menurut pengertian umum, sekulerisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan tertentu. Perhatikan, dari definisi ini, tidak

ada pesan bahwa ateisme akan dianak-emaskan atau agama akan dianak-tirikan. Sekulerisme cuma memisahkan antara agama dan negara, bukannya memaksakan atau mendorong orang agar menjadi ateis, agnostik, atau tidak beragama.

Setelah definisi "sekuler" itu jelas, mari kita lanjutkan dengan melihat kata "negara."

Negara

Kata negara memang sudah sangat umum, dan artinya seharusnya sudah jelas. Namun, banyak orang tak menyadari, negara/pemerintah adalah satu-satunya entitas yang bisa memenjarakan, menyita hak milik, bahkan membunuh kita secara terang-terangan dan legal. Dengan kekuatan legalitas ini, negara bisa dan berfungsi untuk "memaksa" semua entitas lain untuk melakukan hal-hal mereka tak sukai. Contohnya, Undang-undang lingkungan hidup bisa memaksa industri untuk menjaga lingkungan, UMR bisa memaksa perusahaan membayar pegawainya dengan "layak," Undang-undang lalu lintas bisa memaksa semua pengendara untuk tidak menerobos lampu merah dan mengikuti jalur yang telah ditentukan.

Satu lagi hal yang sering dilupakan oleh banyak orang: negara/pemerintah itu dipenuhi oleh politikus. Apapun sistemnya, baik demokrasi, junta militer, kediktatoran proletariat, atau sistem apapun, semua yang menjadi pejabat tinggi negara, atau mau menjadi pejabat tinggi negara secara otomatis menjadi politikus.

Setelah ini, kita buka "karung penutup" utamanya, yaitu alasan-alasan kenapa kita semua membutuhkan negara sekuler.

Alasan #1: Menjamin Keadilan dan Kerukunan Antar Agama

Mari kita hubungkan dua fakta di atas: negara memiliki kekuatan untuk memaksakan entitas-entitas lain. Kalau negara tidak sekuler, berarti negara bisa berlandaskan agama. Pertanyaan berikutnya tentu saja: agama yang mana? Ada begitu banyak agama di dunia ini dengan peraturan yang berbeda. Memberikan kekuatan legal pada salah satunya adalah bentuk ketidak-adilan yang sudah pasti akan menimbulkan gesekan sosial, kecemburuan, dan masalah-masalah lain. Jadi, pemisahan antara agama dan negara adalah syarat mutlak kerukunan antar agama, syarat mutlak persatuan Indonesia.

Alasan #2: Menjamin Kebebasan Beragama

Satu lagi pertanyaan lanjutan selain "agama yang mana", adalah "yakin agama X itu seperti itu?" Bila suatu negara menjalankan sistem menurut agama tertentu, apakah sistem yang dijalankan memang betul-betul sesuai dengan agama tersebut?

Maksudnya, setiap agama memiliki banyak denominasi, banyak aliran, banyak interpretasi. Memberikan kekuatan legal pada salah satu aliran tsb berarti menyatakan bahwa aliran lain itu salah, tidak benar, sehingga tidak pantas mendapatkan kekuatan tsb. Ini adalah praktik yang amat arogan, manusia berusaha menjadi Tuhan, berusaha menentukan mana

aliran yang paling benar dan memberikannya kekuatan untuk memaksakan pilihan tersebut pada orang-orang lain.

Alasan #3: Menjaga Kesucian Agama

Kita semua sudah mafhum betapa seringnya politikus memanfaatkan apapun demi mendulang popularitas. Kita juga sudah mafhum betapa seringnya para politikus berusaha membenarkan kebijakan mereka (Baca: keserakahan/kebodohan/kesalahan mereka) dengan berbagai cara. Mensekulerkan negara berarti memisahkan agama dari tangan dan mulut para politikus, memastikan agama tidak pernah menjadi komoditas politik. Justru dengan hal ini, kita bisa lebih menjaga "kesucian" agama.

Alasan #4: Jawaban terhadap Kekhawatiran Para Penentang Sekulerisme

Penulis merasa tiga alasan di atas lebih dari cukup untuk mendukung sekulerisasi negara. Namun, para penentang sekulerisme mungkin masih khawatir sekulerisasi akan membuat orang-orang tidak mematuhi norma agama lagi. Ijinkan penulis menyampaikan ulang kekawatiran tersebut: "Saya kawatir kalau penganut-penganut beragama tidak dipaksa oleh pemerintah, mereka tidak akan melakukan perintah agamanya." Namun, bukankah kerohanian, keimanan, dan ketakwaan para penganut agama seharusnya datang dari hati dan lubuk terdalam, bukanlah wujud pemaksaan?

Bila negara memaksa rakyat untuk mentaati agama, hal ini hanya akan mencemari dan menihilkan fungsi agama sebagai hal yang rohaniah, yang erat hubungannya dengan penemuan diri sendiri. Ketika negara membuat berusaha mengatur dan memaksakan hal-hal yang menyangkut agama, negara sebenarnya juga sudah meremehkan kemampuan agama untuk membimbing umatnya.

Karena itu, sekulerisasi negara sebenarnya tidak mencemari agama, tapi bisa diarahkan demi kebebasan beragama dan demi kesucian agama juga.

Marcel Hizkia Susanto: *sedang menyelesaikan tugas akhir program Master Kajian Asia Tenggara di Universitas Passau - Jerman.*

PENDIDIKAN & POLITIK AGAMA

Imam Syafi'i

Seharusnya pelajaran agama di sekolah tidak mengajarkan bahwa ajaran mereka sendirilah yang paling benar, sehingga menimbulkan rasa curiga terhadap agama atau kepercayaan lainnya. Tapi bisa diarahkan untuk kebaikan semua manusia, melalui sejarah dan peradabannya. Pelajaran ini pun harus mencakup semua agama yang diakui di Indonesia sekaligus menyampaikan kemungkinan-kemungkinan adanya agama-agama atau kepercayaan yang belum diakui di Indonesia.

Indonesia, Negara yang terkenal dengan keragaman suku, adat, ras, agama, dan budayanya terbentur dengan kenyataan pluralitas yang kompleks. Seakan orang-orangnya belum siap untuk menerima keragaman tersebut, sehingga dalam praktik bernegara sering terjadi ketimpangan sosial yang disebabkan oleh kepentingan golongan dan diskriminasi terhadap kaum minoritas yang lambat laun semakin mengikis persatuan bangsa. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh banyak hal, salah satu yang mempengaruhi adalah sistem pendidikan di Indonesia yang tidak bisa melepaskan diri dari belenggu fundamentalisme kelompok.

Ada apa dengan Pendidikan?

Ketika kita telisik UU SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional) Bab I pasal 1 ayat 1, kita akan menemukan penjelasan bahwa tujuan penddikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Bunyi penggalan undang-undang tersebut menunjukkan kepada kita secara eksplisit bahwa Negara telah ikut campur dalam urusan pribadi yang seharusnya menjadi privasi masing-masing individu. Karena urusan kepercayaan tidak bisa diukur dan dinilai dengan hukum Negara. Jika agama dipaksakan untuk menjadi bagian dari urusan Negara, maka hukum dan dogma agama yang diajarkan di sekolah akan mempengaruhi pola pikir anak didik dan akan berpotensi untuk menjadi tandingan hukum dan konstitusi

Negara.

Hal tersebut jelas tidak kita inginkan. Bagaimana mungkin Negara hukum dan demokratis diatur oleh hukum agama yang tidak lain adalah Kitab Suci. Namun kenyataan yang terjadi adalah, agama menjadi obyek penting dalam aturan hidup di Indonesia. Agama wajib diajarkan di lembaga pendidikan formal sejak dini dengan alasan Indonesia adalah Negara beragama, sehingga sudah seharusnya Negara turut andil dalam pelestarian agama. Agama dianggap penting untuk terlibat dalam program pembangunan moral bangsa, dengan asumsi bahwa semakin agamis suatu masyarakat, semakin luhur pula budi pekertinya. Namun kenyatannya, tidak sedikit penyimpangan dan kerusuhan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan agama. Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa kasus seperti teror bom di beberapa tempat umum, vandalisme atau perusakan rumah-rumah ibadah, diskriminasi pada sekte-sekte yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, dan banyak lagi penyimpangan sosial yang dilatarbelakangi oleh sentimen agama.

Dengan demikian, asumsi bahwa semakin agamis suatu masyarakat, semakin luhur pula budi pekertinya telah terbantahkan dengan beberapa kasus tersebut. Tapi, upaya pemerintah hanyalah sekedar penanggulangan dengan menggerakkan badan hukum yang dibuat khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut, seperti Densus 88, bukannya menggali ke akarnya, yaitu mengoreksi kembali sistem pendidikan yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian bangsa. Karena jika kita pernah mencicipi pendidikan agama di sekolah, maka aspek yang diajarkan adalah aspek hukum atau dogma agama dan akidah, yang nota bene sangatlah rentan dengan eksklusifisme dan fundamentalisme yang intoleran. Padahal, pendidikan adalah aspek terpenting dalam proses pemembentukan kepribadian bangsa. Apa jadinya bila pendidikan dikotori oleh fundamentalisme dan semangat-semangat kelompok yang lambat laun akan membentuk kepribadian bangsa yang puritan dan eksklusif.

Namun, hal itu rupanya telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan politik. Karena semakin fundamentalis suatu masyarakat, semakin tinggi pula keinginannya untuk menjadikan hukum keyakinan mereka menjadi hukum Negara, atau paling tidak, bisa ikut andil dalam menentukan hukum dan aturan hidup warga Indonesia. Dan hal ini merupakan modal besar bagi politikus untuk meraih jabatan di kursi kekuasaan. Kaum fundamentalis adalah pendukung setia yang siap mengangkat seorang politikus yang dianggap bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan mereka. Sehingga upaya yang dilakukan oleh politikus tersebut adalah melestarikan fundamentalisme mulai dari kalangan paling bawah sampai teratas. Dunia pendidikan dianggap sebagai ladang subur untuk melestarikannya.

Legitimasi Fundamentalis oleh Negara

Jika fundamentalisme agama dilegitimasi oleh Negara dengan penyelenggaraan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal, maka Negara juga harus siap ketika konstitusi diintervensi oleh dogma agama yang dibawa oleh orang-orang dari kalangan fundamentalis. Sehingga bukan tidak mungkin

apabila undang-undang nantinya akan dikuasai oleh kepentingan-kepentingan agama yang tidak lain adalah agama mayoritas.

Hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Negara. Namun korbannya tak lain adalah rakyat, terutama kaum minoritas. Jika kita mengingat polemik RUU pornografi beberapa tahun yang lalu, maka itulah salah satu produk dari campur tangan agama dalam menyusun peraturan yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara Indonesia Jika saja RUU tersebut ditetapkan, maka yang dirugikan adalah para pecinta seni dan orang-orang yang menggeluti bidang ini.

Di Indonesia seharusnya rakyatlah yang berdaulat. Namun intervensi agama mayoritas seringkali mampir dalam kedaulatan Negara, sehingga dalam praktik penegakan hukum banyak terjadi diskriminasi terhadap kaum minoritas yang tidak cukup mempunyai kekuatan politik untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan konstitusi.

Berkembang pesatnya Partai politik Islam di Indonesia menunjukkan betapa banyak masyarakat Indonesia yang lebih percaya kepada pemimpin yang pro-fundamentalisme dan melestarikan hubungan keberagamaan dari pada pemimpin yang nasionalis dan menjaga hubungan kewarganegaraan. Hal ini tidak lain adalah salah satu dampak dari proses pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah formal. Politik Islam sudah tentu akan menghasilkan produk hukum ala Islam dan dampaknya sudah tentu adalah fundamentalisme dan penggolongan masyarakat secara hirarkis berdasarkan agamanya.

Jefrey K. Hadden mengatakan dalam Profetic Religion and Politic (86) “Kebangkitan politik Islam pada umumnya merupakan gejala telah lahirnya global fundamentalisme yang siap melakukan penghadangan dan resistansi terhadap globalisasi, liberalisasi, serta kepentingan-kepentingan Barat”. Dengan demikian kebangkitan politik Islam berpotensi untuk menghambat terwujudnya bangsa yang adil dan sejahtera disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik yang akan cenderung memihak kelompok Islam. Oleh karena itu kebangkitan politik Islam di Indonesia harus diantisipasi dengan semangat multikultural sebagai perwujudan dari penerimaan realitas kebangsaan yang multi suku, adat, ras, agama, dan budaya. Untuk mewujudkannya tidak lain adalah dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis multikultural dan pluralisme yang menanamkan kesadaran akan keanekaragaman SARA dan menuntun anak didik untuk bisa hidup berdampingan dengan bermacam-macam perbedaan.

Dengan demikian upaya yang seharusnya dilakukan oleh Negara adalah menjalankan program pendewasaan masyarakat dengan merekonstruksi sistem pendidikan di sekolah formal ke arah pengutamaan kesadaran multikultur dan mereduksi atau paling tidak meminimalisir hal-hal yang menyebarkan bibit fundamentalisme.

Pelajaran Agama

Seharusnya pelajaran agama di sekolah tidak mengajarkan bahwa ajaran mereka sendirilah yang paling benar, sehingga menimbulkan rasa curiga terhadap agama atau kepercayaan lainnya. Tapi bisa diarahkan untuk kebaikan semua manusia, melalui sejarah dan peradabannya. Pelajaran ini pun harus mencakup semua agama yang diakui di Indonesia sekaligus

menyampaikan kemungkinan-kemungkinan adanya agama-agama atau kepercayaan yang belum diakui di Indonesia mengingat begitu pesat perkembangan budaya di dunia, tanpa harus memasukkan hukum dan doktrin kepercayaan agama tertentu yang pada akhirnya akan menjadi bibit fundamentalisme dan pemahaman yang sempit tentang agama.

Pada intinya, Negara harus berupaya untuk memisahkan diri dari agama (menerapkan sekularisasi) secara utuh. Namun jika pelembagaan agama sebagai sarana dakwah atau pelestarian agama di masyarakat masih dianggap perlu bagi sebagian kelompok, maka biarlah itu diatur oleh lembaga otonom agama, dengan catatan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan tidak keluar dari hukum dan norma bernegara. Dan tugas Negara hanyalah untuk melayani lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan proporsinya masing-masing tanpa pandang bulu.

Dengan begitu, kita berharap masyarakat bisa menerima realitas multikultural secara utuh. Penerimaan yang dimaksud tentu bukan sekedar toleransi, namun kesadaran untuk menerima dan menghormati orang lain yang berbeda, sehingga tercipta keharmonisan dan persatuan dalam perbedaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rocky Gerung – dosen besar Universitas Indonesia Jakarta – dalam salah satu pidatonya "perbedaan kita tidak boleh menghalangi kita untuk berkata sama di depan ayat konstitusi, bukan ayat-ayat suci (kitab suci agama)".

Dengan sistem sekuler (pemisahan Negara dari agama), bukan berarti Negara menjadi anti terhadap agama, namun justru sekulerisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan karena dalam menentukan kebijakan, terutama yang politis, akan didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Sehingga Negara akan kembali pada tujuan utamanya yaitu untuk melindungi hak setiap warga Negaranya, dan warga Negara bisa lebih bebas untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa harus diatur oleh Negara. Serta konflik yang dilatarbelakangi oleh agama dapat dicegah, karena sejak dini masyarakat telah dididik dengan semangat kebhinnekaan. Kalaupun masih ada penyimpangan sosial yang dilatarbelakangi oleh agama, paling tidak hukum yang berlaku akan bertindak tegas terhadap konflik-konflik yang terjadi di masyarakat tanpa mempertimbangkan hirarki keberagamaan, sehingga diskriminasi terhadap agama minoritas tidak lagi terjadi dan keutuhan hubungan kewarganegaraan akan terjaga.

Imam Syafi'i: *Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Qomaruddin Bungah Gresik.*

MAAF, DILARANG BERCELANA PENDEK DI SINI

Oleh Fandy Hutari

Indonesia adalah negara absurd. Coba saja perhatikan, ada saja kasus-kasus yang menimpa beberapa komunitas di negeri ini. Dahulu, saat Soeharto masih memimpin, pernah ada beberapa kasus menggelikan, bahkan mengerikan. Pada awal 1970-an, anak muda berambut gondrong siap-siap kena razia aparat. Saat itu, rambut gondrong dinilai tak mencerminkan "kepribadian bangsa". Pada 1971, artis-artis berambut gondrong dilarang muncul di TVRI. Larangan ini merembet ke ruang-ruang yang lebih luas, seperti sekolah, kampus, gedung pemerintahan, dan tempat publik. Militer menenteng gunting untuk mencukur pria gondrong di jalan-jalan (Yudhistira: 2010). Ada pelarangan, secara tak langsung, orang yang menato tubuhnya. Kasus ini mencuat pada 1980-an, bahkan sempat ditemukannya mayat-mayat pria bertato di ruang publik. Mereka dicap sebagai para penjahat kambuhan yang wajib dimusnahkan. Kasus ini dikenal juga sebagai petrus (penembakan misterius).

Pada Desember 2011 lalu, ada pula peristiwa yang membuat saya tercekat, sekaligus geleng-geleng kepala. Ya, pembubaran, penangkapan, dan pembimbingan secara paksa oleh aparat syariah di Aceh terhadap komunitas punk yang sedang menghadiri sebuah konser. Otoritas daerah di sana menganggap, mereka meresahkan dan bisa memengaruhi generasi muda di Banda Aceh. "Ini untuk meminimalisasi ajaran sesat dan perilaku yang menyimpang dari norma dan agama. Jika kita biarkan, perilaku mereka akan mempengaruhi generasi muda," begitu kata Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal (vivanews.com, 15 Desember 2011). Nah, kasus aneh lainnya datang dari Tangerang. Menurut pemberitaan, awal Januari 2012 lalu, polisi di Tangerang merazia beberapa perempuan yang mengenakan celana pendek.

Apa sebab? Alasannya, untuk menghindari tindak pornografi dan hal-hal yang tidak diinginkan (beritasatu.com, 13 Januari 2012). Meminjam kalimat Deddy Mizwar: Alangkah lucunya negeri ini!

Celana Pendek: Dari mana asalnya?

Di Bandung, Jakarta, dan di beberapa daerah, saya tak lagi merasa aneh jika melihat banyak perempuan memakai celana pendek di ruang publik. Sudah biasa! Dan, saya pikir sah-sah saja. Namun, memang fenomena ini baru saya rasakan massif-nya lima tahun ke belakang. Saya pikir fenomena style celana pendek dimulai ketika anak muda demam budaya Korea. Istilahnya, ini gaya hidup remaja perempuan masa kini.

Menurut Nyoman Lia Susanthi dalam artikelnya berjudul "Gurita Budaya Populer di Indonesia" (2011), demam Korea atau Korean wave diawali dengan penyebaran dan pengaruh budaya Korea, melalui produk budaya populer. Misalnya, lewat film, drama, musik, dan pernak-pernik. Susanthi melihat, penyebarannya terasa sekitar 2002 dengan tayangnya drama seri berjudul "Autumn in My Heart" atau "Autumn Tale", yang lebih dikenal dengn judul "Endless Love" di Indosiar. Setelah itu, Susanthi mencatat, ada sekitar 50 judul Korean Drama (K-drama) yang tayang di televisi swasta Indonesia. Budaya ini lalu menjalar ke bidang musik. "Korean pop atau K-pop mulai menggurita di kancah musik Indonesia. Terlebih lagi pada tanggal 4 Juni 2011 lalu Indonesia dihebohkan dengan sebuah festival bernama 'KIMCHI K-POP' (Korean Idols Music Concert Hosted in Indonesia).

Media massa, perlahan tapi pasti, turut menyebarkan "virus" ini. Tak pelak, iklan-iklan pun dibanjiri budaya Korea tadi. Artis-artis Korea, tepatnya Korea Selatan, banyak mengenakan busana yang kinclong dan seksi, seperti celana pendek warna-warni. Dugaan saya, fashion yang berkembang di kalangan anak-anak muda perempuan zaman sekarang berkiblat dari Korea tadi (selain juga Jepang).

Lain di Tangerang, lain pula di Paris, Perancis. Di sana, ada "larangan" yang terbalik: perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Aturan ini berlaku sejak 200 tahun lalu, dan mengalami berbagai revisi. Larangan aneh ini pertama kali diperkenalkan pada akhir 1799 oleh kepala polisi Paris. Dari situ, pemerintah paris menetapkan setiap wanita yang ingin 'berpakaian seperti pria' harus meminta izin

khusus dari kepolisian yang akan memeriksa kondisi kesehatan kaki mereka. Seiring perkembangan zaman, Presiden Nicolas Sarkozy berjanji menyisihkan waktu khusus agar parlemen meninjau undang-undang Perancis kuno yang harus dicabut (vivanews, 2 Agustus 2011). Di Korea Utara hampir mirip. Di negeri yang "misterius" tersebut, dikabarkan bahwa perempuan juga dilarang memakai celana panjang. Dengan dalih moral, pemerintah Korea Utara menindak tegas kaum hawa yang meninggalkan busana konvensional. Polisi merazia perempuan yang ketahuan memakai celana panjang di tempat publik."Wanita diminta mengenakan rok di jalan dan tempat umum. Hal itu memunculkan komplain dari wanita yang bekerja dalam kondisi menuntut gerakan fisik keras dan bagi para pelanggar peraturan itu menghadapi ancaman hukuman kerja paksa tanpa bayaran dalam kurun waktu tertentu atau denda KRW 700 (sekitar Rp 5.600). Di Korut, denda sebesar itu setara dengan bayaran pekerja umum selama hampir seminggu," ujar Direktur Organisasi Hak Asasi Manusia Good Friends, Lee Seung-yong (artikelindo).

Gaya hidup memunculkan dua hal sama yang sekaligus berbeda, yaitu perlawanan atau peniruan. Perlawanan biasanya diwujudkan dengan membangun identitas diri yang berbeda dari yang lain. Hal ini bisa menjadi sebuah bentuk resistensi untuk tidak mengikuti arus kapitalisme. Celana pendek yang dipakai di suatu tempat dan waktu bisa menjadi perlawanan terhadap mode atau trend, tapi juga sebagai peniruan. Di Indonesia, pemakaian celana pendek bisa menjadi keduanya. Pada saat ada pelarangan perempuan memakai baju minim, celana pendek bisa menjadi perlawanan.

Tapi bila sekedar mengikuti mode atau sinetron, hal ini ini menjadi peniruan. Model-modelnya pun meniru apa yang sudah dipampang di TV, film dan majalah: ketat dan berwarna-warni. Ya, seperti yang dipakai oleh artis-artis Korea tadi, yang bisa juga dilihat di Plaza-plaza Jakarta. Namun, mode baju apa yang tidak saling tiru? Baju yang kita pakai pun telah meniru model-model yang lain. Perubahan baju adat di Indonesia juga meniru masuknya berbagai model dari dalam maupun luar negeri. Lalu, mengapa baju perempuan selalu diributkan?

Perda diskriminatif akan Pakaian Perempuan

Otonomi daerah memberikan kebebasan otoritas daerah untuk membuat satu kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Namun, celakanya mengarah ke aturan yang cenderung diskriminatif terutama terhadap perempuan. Mengutip tulisan Fanny Chotimah,"Atas Nama Moral, Perempuan Dikriminalkan", pada 2010, Komnas Perempuan mengklain ada 189 kebijakan daerah yang diskriminatif. Perempuan dan kelompok minoritas dirugikan oleh kebijakan yang menggunakan simbol agama dan alasan moralitas. Kebijakan itu membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Suara Merdeka, 2 Februari 2011).

Di Sumatra Barat, tepatnya Padang, ada aturan soal jilbab bagi para siswi. Aturan ini mengacu pada Instruksi Walikota Padang nomor 451.422/Binsos-III/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja didikan subuh dan antitogel/narkoba serta berpakaian muslim/

muslimah bagi murid/siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/SMA di Kota Padang. Anehnya, peraturan ini merambah ke siswi beragama selain Islam juga. Seperti pengakuan seorang ibu yang siswinya harus mengenakan jilbab di sekolah berikut ini, "Sebenarnya peraturan ini kabur karena seolah-olah Perda menghilangkan komunitas agama Kristen dan komunitas lain di dalam aturannya. Seharusnya dalam sekolah negeri, semua agama dapat masuk. Tapi kok di sekolah ini yang non-Muslim harus mewajibkan memakai pakaian Muslim, jilbab, dan sebagainya. Sebagai peraturan terpaksa diikuti tetapi kami sadar peraturan ini tidak begitu jelas tujuannya," katanya yang saya kutip dari hasil wawancara Mohammad Guntur Romli (note Facebook Mohammad Guntur Romli, 2009).

Jilbab ini sudah terlanjur menjadi sebuah simbol Islam. Padahal, menurut Fedwa El Guindi (2003), jilbab itu juga dipakai, atau pernah dipakai, oleh perempuan non-Islam. Jilbab bisa berfungsi sebagai bahasa penyampai pesan sosial budaya. Bagi penganut Kristen Protestan, jilbab merupakan simbol bermuatan ideologis. Di kalangan umat Katolik, jilbab menandai pandangan tentang kewanitaan dan kesalehan. Sedangkan pada masyarakat Islam, jilbab bisa menjadi alat resistensi. Di setiap negara, penggunaan jilbab pun bertujuan beda. Dalam kebudayaan Arab kontemporer, misalnya, lebih merupakan identitas serta kerahasiaan pribadi dari sisi ruang dan tubuh. Dalam latar sosial masyarakat Arab, para pemakai jilbab berhubungan secara eksklusif dalam tingkatan dan nuansa tertentu yang ada dalam lingkungan keluarga. Berjilbab juga merupakan simbolisasi kekuasaan dan otonomi, serta dapat dijadikan alat pertahanan diri. Di Mesir, berjilbab bukan praktik yang membatasi gerak manusia. Jilbab adalah fenomena urban yang lebih banyak diasosiasikan dengan kelas atas (282: 2003). Di Palestina, jilbab menjadi salah satu alat perlawanan terhadap penjajahan kontemporer. Sedangkan di Aljazair, jilbab merupakan simbol resistansi melawan hukum penjajah asing dan melawan rezim yang tidak disahkan oleh pemilu, tapi tetap menegaskan tradisi dan identitas Aljazair (274: 2003).

Untuk kasus penjilbaban siswi di Padang, dan beberapa daerah lainnya, harusnya disesuaikan dengan kondisi kultur Indonesia. Kenyataan, setiap daerah di Indonesia berbeda dalam hal pakaian, khususnya pakaian adatnya. Jilbab yang diatur itu cenderung mengarah ke "pencomotan" budaya Arab, tanpa disesuaikan dengan keragaman kita di sini.

Selain Perda yang tadi sudah disebutkan, masih banyak Perda yang sifatnya malah mengarah ke aturan agama tertentu, misalnya SK Bupati Kabupaten Pandeglang No.09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah; Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang seragam pemakaian busana Muslim bagi siswa dan mahasiswa di Kabupaten Sukabumi, Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjarmasin No. 065.2/00023/ORG tentang pemakaian jilbab bagi PNS Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarmasin Tertanggal 12 Januari 2004.

Kembali ke Tangerang, mungkin masih ada yang ingat ihwal salah tangkap di sana. Kasus ini menimpa seorang perempuan bernama Lilis Lindawati. Saat pulang kerja malam, Lilis yang bekerja di rumah makan "diamankan"

karena diduga seorang pelacur. Di persidangan, Lilis dihukuman empat hari penjara. Hakim beralasan, putusan tersebut diambil karena Lilis tidak mampu menghadirkan saksi yang menguatkan keterangan bahwa dirinya bukan pelacur. Tiga hari setelah divonis, suami Lilis, Kustoyo, mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Kedatangan pria yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar ini untuk menjemput sang istri. Namun, upaya Kustoyo membebaskan Lilis gagal. Dia diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 ribu jika ingin membawa istrinya pulang. Kustoyo menolak membayar. Apalagi, karena Lilis bukan pelacur. Bahkan Kustoyo memperlihatkan bukti surat nikah dan kartu keluarga. Tindakan petugas Trantib dalam kasus Lilis terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang diberlakukan Pemerintah Kota Tangerang. Dalam Perda ini antara lain berbunyi, setiap orang yang perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, lapangan-lapangan, atau di warung kopi (liputan6.com, 3 Maret 2006).

Beredarnya foto polwan menegur remaja perempuan pendukung Persita Tangerang di Stadion Benteng pada laman Antara (11 Januari 2012), dengan alasan agar terhindar dari “hal-hal yang tidak diinginkan” pun mendapat reaksi dari beberapa kalangan. Meski tak “seseksi” isu penangkapan dan pembimbingan paksa “anak punk” di Aceh, kasus peneguran celana pendek ini mungkin patut jadi perhatian juga. Nah, peneguran celana pendek di Tangerang, bisa jadi juga soal implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2005 tadi. Perda yang cenderung diskriminatif.

Bhinneka?

Lalu, dengan kenyataan seperti di atas, apakah Indonesia ini negara agama, sekuler atau apa?

Kata John T.S. Madeley dan Zsolt Enyendi dalam bukunya, Church and State in Contemporary Europe, negara sekuler adalah salah satu konsep sekulerisme. Sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Dari pengertian ini, kita bisa memastikan kalau Indonesia bukan negara sekuler. Ada beberapa catatan yang bisa menegaskan hal ini. Pertama, jika Indonesia itu negara sekuler, maka Kementerian Agama tidak pernah ada. Kedua, jika Indonesia negara sekuler, berarti negara tidak memberikan bantuan apapun tentang masalah keagamaan.

Lalu, apakah Indonesia itu negara agama? Kalau iya negara agama, berarti hukum yang berlaku di negara ini berdasarkan hukum agama tertentu. Staf dan speech writer Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Pan Mohamad Faiz, dalam artikelnya berjudul “Indonesia Bukan Negara Agama ataupun Negara Sekuler,” (2008) mengatakan, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan juga negara sekuler, melainkan negara Pancasila (Pancasila state). Katanya, hukum Islam hanya dijadikan salah satu sumber hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan di wilayah Indonesia (jurnalhukum.blogspot.com). Dalam sebuah pidato kenegaraan pada 1 Juni 2011 lalu, Presiden Yudhoyono pun mengatakan, Indonesia adalah (negara) berketuhanan sekaligus negara nasional. Bukan berdasar agama. Tetap religius, bukan sekuler (vivanews, 1 Juni 2011).

Tapi, saya merasa, mungkin sebagian pembaca juga sepakat, Indonesia kini mengarah ke wacana ideologi agama. Usai Soeharto tumbang, seiring menguatnya wacana syariat Islam, giliran warga sipil yang mendominasi, dan dampaknya tak kalah serius bagi kebebasan individu. Konon, Indonesia itu punya motto yang luhur: Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu indah. Mengapa harus dipaksakan jadi seragam?

Jika kita tilik, beberapa Perda memang menggiring masyarakat ke sebuah peraturan berdasarkan agama dan diskriminasi perempuan. Padahal, dalam konsep negara Bhinneka yang kita agung-agung kan itu, kita harus memupuk toleransi dan keberagaman. Koentjaraningrat mengatakan dalam bukunya Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional (19: 1993), walaupun sekitar 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia itu bukan negara Islam. Lima agama dunia yang memuja satu Tuhan secara resmi diakui, walau masih banyak religi yang disebut kepercayaan tradisional.

Dalam hal agama ini, saya menjadi khawatir, Indonesia nanti senasib dengan Yugoslavia. Dalam sejarahnya, Yugoslavia yang juga multietnis dan agama, pernah mengalami konflik yang mengerikan, salah satunya konflik agama. Sebuah kekerasan yang berakar mendalam telah berkembang antarsuku bangsa di bagian utara dan barat laut, seperti suku bangsa Slovenia, Kroasia, dan Serbia Utara yang awalnya didominasi oleh orang Austria di abad ke-16, dengan suku bangsa di Selatan yang mengalami dominasi Turki. Setelah berabad-abad selanjutnya, saat suku bangsa Slav Selatan teriris oleh sejarah, timbul kebencian yang mendalam di antara penganut Katolik dan penganut Islam, yang diperkenalkan oleh Turki. Orang Slav Selatan yang berorientasi Kristen Eropa mengembangkan folklor soal pemujaan pahlawan lewat pembunuhan atas sesama orang Slav Selatan yang berorientasi Islam Asia. Begitu juga sebaliknya (Koentjaraningrat, 53: 1993).

Kasus celana pendek seringkali mengatasnamakan agama, juga mengarah ke pendiskriminasian perempuan. Menyoal peneguran celana pendek di Tangerang, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah, berpendapat, polisi seharusnya memosisikan diri sebagai pengaman, bukannya malah melarang dan berkata seolah remaja perempuan bisa menjadi penyebab tindak pornografi. “Kalau main larang dengan alasan bisa mengundang nafsu, sama saja polisi melempar tanggung jawab kepada perempuan,” katanya (beritasatu, 13 Januari 2012).

Kalau alasannya berpakaian itu untuk meminimalisir pemerkosaan, terlalu naif. Niat memperkosan itu ada di otak masing-masing orang. Bukan di tubuh perempuan. Sangat mungkin peneguran itu berdasarkan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Mengutip artikel Fanny Chotimah (Suara Merdeka, 2 Februari 2011), perempuan dianggap biang keladi, sumber godaan, sehingga harus menutup diri agar moral masyarakat (laki-laki) terjaga. Perempuan dikondisikan mengalah dan menjadi korban. Perda mengenai prostitusi dan pemberlakuan razia hanya pada PSK (perempuan), sedangkan pria hidung belang bisa berkeliaran seenak hati dan bebas pulang ke rumah.

Sekali lagi, negara kita amat beragam.

Punya banyak adat-istiadat, begitu pula cara berpakaiannya. Bagaimana dengan pakaian perempuan Bali yang tidak mengenakan penutup dada? Saat ini, di kota-kota besar, tidak lagi dikenakan, tapi di desa-desa Bali, masih banyak perempuan yang terlihat di publik tanpa penutup dada. Lalu, coba perhatikan orang-orang yang masih memakai baju adat di Papua. Bayangkan, jika polwan-polwan itu pergi ke sana, berapa banyak orang yang mereka tegur. Negara kita juga negara terbuka, yang bisa menerima budaya dari manapun masuk ke sini. Celana pendek di kalangan remaja perempuan itu merupakan fenomena budaya pop dalam tatanan globalisasi fashion. Wajar-wajar saja dan tak perlu dianggap sesuatu yang heboh.

Tapi, para penguasa negara kita lebih suka mengurusi hal yang remeh-temeh seperti tato, rambut gondrong dan celana pendek, daripada hal yang jauh lebih serius. Kita lihat saja parodi selanjutnya di negara ini. Apakah masih ada kasus yang lebih menggelikan lagi?

Referensi:

Buku

Adlin, Alfathri (ed). 2006. *Resistensi Gaya Hidup; Teori dan Realitas*. Jalasutra:Yogyakarta.

Baudrillard, Jean. 2000. *Berahi*. Bentang: Yogyakarta.

El Guindi, Fedwa. 2003. *Jilbab; Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Serambi: Jakarta.

Gunawan, Rudy FX. 2000. *Refleksi atas Kelamin; Potret Seksualitas Manusia Modern*. Indonesia Tera: Magelang.

Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integritas Nasional*. UI Press: Jakarta.

Madeley, John.T.S dan Zsolt Enyendi (ed). 2005. *Church and State in Contemporary Europe; the Chimera of Neutrality*. Frank Cass: London, Portland.

Magnis-Suseno, Franz. 2000. *Kuasa dan Moral*. Gramedia: Jakarta.

Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Agama*. Mizan: Bandung.

Yudhistira, Aria Wiratma. 2010. *Dilarang Gondrong; Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an*. Marjin Kiri: Tangerang.

Artikel

Chotimah, Fanny. 2011. "Atas Nama Moral, Perempuan Dikriminalkan" dalam *Suara Merdeka*, 2 Februari 2011.

DeLamater, John, dan Morgan Sill. 2004. "Sexual Desire in Later Life" dalam *Journal of Sex Research*.

Faiz, Pan Mohamad. 2008. "Indonesia Bukan Negara Agama ataupun Negara Sekuler," dalam *jurnalhukum.blogspot.com*, 13 Agustus 2008.

Guntur Romli, Mohammad. 2009. "Wawancara dengan Seorang Ibu Wali Murid dan Guru Sekolah yang Beragama Kristen" dalam *Note Facebook Mohammad Guntur Romli*, 30 Oktober 2009.

Nurlaila, Anda. 2011. "Kota ini Larang Wanita Pakai Celana Panjang" dalam *vivanews.com*, 2 Agustus 2011.

Susanthi, Nyoman Lia. 2011. "Gurita Budaya Populer Korea di Indonesia" dalam *isi-dps.ac.id*, 2 Oktober 2011.

Internet

www.antaranews.com.
www.artikelindo-admin.blogspot.com.
www.beritasatu.com.
www.vivanews.com.
www.wikipedia.org.

***Fandy Hutari:** jurnalis, penulis, dan editor buku. Tinggal di Bandung.*

PENGADILAN DAN IMAM KAYAFAS

Oleh Chris Poerba

Taman Getsemani, menjelang subuh. Ketika Yesus sedang berdoa. Dengan tiba-tiba, dia ditangkap. Pasukan Romawi datang mengepung, membawa pedang dan pentungan. Padahal waktu itu, Yesus, hanya di temani oleh beberapa muridnya, yang semuanya telah terlelap. Pasukan Romawi dan Yudas Iskariot disuruh oleh imam-iman kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua untuk segera menangkap Yesus. Sebuah kecupan Yudas Iskariot, menjadi tanda bahwa prosesi penderitaan Yesus akan dimulai. Lantas apa hubungannya tulisan ini dengan negara sekuler?

Mahkamah Agama

Di dalam kitab Markus, setelah Yesus ditangkap, dia diajukan ke hadapan Mahkamah Agama, menghadap kepada Imam Besar. Setelah berbelit-belit dan dicari-cari kesalahannya maka Imam Besar memutuskan Yesus bersalah. Namun di Kitab Yohannes, setelah penangkapan Yesus di Getsemani, dia tidak digiring ke rumah tahanan dengan jeruji besi atau semacamnya. Mula-mula Yesus dibawa ke rumah Hanas, yaitu mertua dari Imam Besar Kayafas. Namun apa perlunya Yesus dihadapkan ke Hanas, kalau Hanas sendiri bukan imam besar Yahudi, kala itu. Setelah dari Hanas selanjutnya Yesus dibawa ke Kayafas. Dan yang tertulis hanyalah, Yesus kemudian dibawa ke istana Imam Besar Kayafas. Apakah istana yang dimaksud adalah istana Mahkamah Agama? Atau rumah Imam Kayafas saja? Dan apakah Mahkamah Agama pun buka tengah malam? Tidak begitu jelas dan sedikit mengada-ada. Setelah dari Imam Kayafas, dalam artian mufakat telah diambil oleh para imam-imam besar, baru pagi hari kemudian, Yesus diajukan ke pengadilan Pontius Pilatus. Pengadilan yang sekuler.

Mengingat Israel waktu itu masih berada dalam jajahan kekaisaran Romawi, maka peraturan yang diberlakukan adalah peraturan negara sekuler, yang berasal dari Pilatus. Peraturan sekuler ini berlaku pada siapa saja, termasuk kepada Yesus bahkan Imam Kayafas sendiri. Dalam hal ini, baik itu Yesus, Imam Kayafas, dan semua orang Yahudi akan diberlakukan aturan dari kekaisaran Romawi yang sama dan setara.

Namun Imam Kayafas, adalah seorang Yahudi yang strata kedudukannya lebih tinggi, dibanding orang Yahudi yang lain. Seorang Imam Besar. Sehingga dia memiliki pegecualian. Bahkan dialah yang paling khawatir setelah hadirnya seorang yang bernama Yesus. Dia takut kalau Yesus yang hobi khotbah di pasar dan setiap tikungan jalan, dapat membuat orang-orang Yahudi yang lain, tidak mau lagi datang lagi ke bait suci. Ini akan menyebabkan uang sumbangan di bait suci semakin berkurang dan tidak ada lagi pemasukan untuk kas di bait yang katanya suci itu, untuk mengupahi dan menggaji para majelis.

Alhasil, jalan pintas diambil, Yesus langsung difatwakan sesat oleh Imam Kayafas. Sesederhana itu Yesus dituduh menghujat Allah Israel. Selanjutnya dia menggunakan aturan-aturan kerohaniannya, agar kekaisaran romawi memberikan hukuman kepada Yesus. Mungkin Imam Kayafas sudah mengetahui bila hukum yang berlaku secara keseluruhan adalah hukum kekaisaran Romawi (yang sekuler), bukan hukum dari mejelis bait sucinya (yang agamis-non sekuler). Namun dia sudah gelap mata tetap memaksa agar Pontius Pilatus, tetap menjatuhkan hukuman ke Yesus.

Pontius Pilatus, yang Romawi jelas berbeda iman dan agamanya dengan orang Yahudi. Jadi dia tidak begitu perduli, dengan apa yang dikatakan Imam Kayafas. Apakah Yesus itu mesias atau bukan? Apakah Yesus menghujat Allah atau tidak? Sesat atau tidak? Sehingga saat Yesus diajukan ke pengadilan Romawi yang jelas-jelas sekuler, Pontius Pilatus tidak melihat ada sebuah kesalahan pun dalam diri Yesus. Tidak melakukan kriminal, tidak mencuri, bukan penjahat dan tidak melakukan kejahatan kemanusiaan. Bahkan Pilatus mengusulkan agar Yesus dibebaskan saja karena ada kebiasaaan dari Yahudi untuk melepaskan tahanan, di hari Paskah, juga ditolak oleh orang-orang Yahudi kebanyakan.

Imam Kayafas berhasil mempengaruhi dan mendesak banyak orang-orang Yahudi lain (dengan ayat-ayat sesat dan menghujat Allah), yang akhirnya memaksa Pontius Pilatus memutuskan Yesus bersalah. Akhirnya, Pontius Pilatus pun khawatir kalau nantinya akan ada pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang akan menggulingkan kekuasaannya. Pilatus takut kalau hal ini terus dibiarkan, orang-orang Yahudi tidak dituruti kemauannya, maka akan ada revolusi besar-besaran. Yang ujung-ujungnya, Yahudi menuntut merdeka!

Jalan pintasnya adalah Yesus disalibkan. Bukanlah Kekaisaran Romawi (dengan aturan sekuler) yang menyalibkan Yesus, namun desakan Imam Kayafas yang berhasil memaksa atau menginfiltrasi nilai-nilai agamis (non sekuler) kepada Pontius Pilatus. Sederhananya Imam Kayafas yang menyalibkan Yesus, yang juga sama-sama Yahudi. Yesus dihakimi dan disalibkan dengan aturan agamis (non sekuler), aturan sepihak dari kalangan agamis Yahudi. Karena Yesus dianggap menghina dan menghujat Allah, dalam ajaran mereka Yesus adalah sesat!

FPY: Fasis Pura-Pura Yahudi

Ternyata peristiwa yang di alami Yesus, sama dengan kondisi di Indonesia sampai saat ini. Diskursus mengenai negara sekuler dan negara agamis (yang berbasiskan salah satu agama) masih terus berkumandang. Bahkan semakin menggila. Bila Imam Kayafas berhasil memaksa Pontius Pilatus memasung Yesus, yang dianggap sesat, ormas-ormas berjubah berhasil memasung pemerintah untuk membuat peraturan dan kebijakan, kepada yang mereka anggap sesat. Lihat saja peraturan SKB 3 Menteri yang telah diberlakukan. Dan terakhir masih hangat adalah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Dalam berbagai kebijakan yang ada ini, maka “Iman Kayafas” ditengarai masih terlibat di dalamnya.

Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) ini bukan “mainan baru”, dan pernah ditolak tahun 2002 yang silam. Pada waktu itu, karena banyak yang melihat RUU KUB ini cenderung rasialis.

Akhirnya RUU KUB, yang saat itu diusulkan oleh Departemen Agama, dibatalkan, bahkan disangkal sendiri oleh Departemen Agama. Seolah-olah RUU KUB itu tidak pernah ada. Namun kemarin sudah mencuat lagi dan substansinya nyaris tidak ada bedanya dengan tahun 2002. Banyak kejanggalan, seperti di dalam naskah akademis maka disebutkan ada agama dan kepercayaan, namun ketika masuk ke dalam perumusan draft RUU KUB, yang tinggal hanya agama, sedangkan kepercayaan sudah "menguap", tidak dibahas lagi, hilang entah kemana! Selain itu ada definisi agama yang rancu, antara agama langit dan agama bumi. Terminologi agama yang digunakan juga terlalu mengambil perspektif agama samawi, terlalu sempit. Bahkan pasal penodaan agama tak lebih merupakan copy paste dari UU PNPS 1965.

RUU KUB ini akan menjadi masalah di kemudian hari, karena nantinya akan mengatur apa itu kerukunan, dan akhirnya kerukunan hanya menjadi perspektif dari salah satu kelompok saja. Bila ada agama atau aliran dalam satu agama yang dianggap meresahkan, maka merekalah yang dianggap membuat tidak rukun dan perlu ditindak. Biasanya yang akan menjadi korban adalah agama-agama yang belum dianggap resmi, agama-agama lokal, termasuk juga kaum yang tidak beragama. Padahal yang semestinya dijamin adalah kebebasan setiap orang dalam menjalankan agamanya. Dibandingkan kata kerukunan, maka kata kebebasan dan kemerdekaan lebih ditekankan di UUD 1945. Pasal 28, dari UUD 1945 memiliki logika kebebasan. Sedangkan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan dengan jelas, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Kata kemerdekaan lebih ditekankan. RUU KUB ini bisa menjadi bumerang bagi kebhinekaan Indonesia, karena RUU KUB ini bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila perspektif kerukunan ini diterjemahkan oleh kelompok-kelompok "Imam Kayafas", maka akan sangat berbahaya. Mereka seolah memiliki otoritas untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Iman Kayafas, di jaman Yesus hidup, adalah seorang imam besar. Namun dalam kasus penyalibkan Yesus, dengan menyatakan Yesus sesat, dia sudah diskriminatif. Dia berada dibelakang penyaliban Yesus, karena memiliki kekuasaan keagamaan yang luar biasa besar. Sehingga dia bisa mengajukan fatwa atau konsili apapun agar otoritas kekuasaannya tidak terganggu.

Imam Kayafas tidak merepresentasikan Yahudi secara keseluruhan. Dia ibarat FPY: Fasis Pura-Pura Yahudi. Mengapa? Karena belum tentu semua orang-orang Yahudi yang lain sama, sejalan dan seturut dengan kehendaknya. Bisa saja di jaman itu, memang ada orang Yahudi yang tidak sepaham dengan Yesus sebagai Mesias, namun juga tidak sepaham dengan penyaliban yang dilakukan kepada Yesus.

Begitu juga di Indonesia. Pemerintah tidak bisa dianggap sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Sampai bulan Februari 2012, RUU KUB ternyata tidak masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas), untuk disahkan 3 tahun ke depan, meski sebelumnya sudah ada desas-desus seperti itu. Namun RUU KUB atau aturan yang non sekuler (condong agamis) semacam ini, ibarat siluman, bisa muncul kapan saja!

Mobrokasi = Mobster + Demokrasi

Di Indonesia, masih banyak "Iman Kayafas", dari lintas agama dan aliran keagamaan tertetu, yang berusaha terus memasukan nilai-nilai agamis, yang non sekuler, ke dalam aturan sekuler yang telah disepakati di Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Lihat saja masih ada partai yang terus getol dan terus bebas melenggang sampai saat ini mengumandangkan syariat Islam. Di Papua, tepatnya Manokwari, pernah diusulkan peraturan daerah (perda) kabupaten yang aturan-aturannya berbasiskan Injil. Di Jawa Barat, masih ada sempalan NII yang sempai sekarang seperti terus dipelihara. Ditambah dengan anggapan kalau agama yang dianggap resmi hanyalah 6 saja, sisanya tidak resmi. Di Kalimantan, ada seruan, hanya boleh melakukan misi kepada mereka-mereka yang berada, di luar 6 agama yang dianggap resmi.

Padahal semua umat, apa pun agamanya, yang dianggap sesat atau tidak sesat, beragama atau tidak beragama, semuanya sama dan setara, karena telah menjadi warga negara Indonesia, negara dengan hukum sekuler. Namun apa daya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang ugal-ugalan. Demokrasi dalam arti sempit. Meminjam istilah dari Alain Badiou demokrasi dalam artian privatisasi demokrasi: saya akan melakukan apa pun yang saya mau, karena itu hak saya. Tetangga saya bebas membangun rumahnya setinggi 8 meter, alhasil saya tidak kebagian sinar matahari pagi, dan jemuran tidak kering.

Malahan saat ini, kita sudah bukan lagi demokrasi, melainkan mobokrasi. Mobokrasi, yang mengawinkan dua istilah yaitu, mobster dan demokrasi, jelas menyiratkan makna demokrasi yang dilakukan oleh sekumpulan mafia. Perspektif para mafia untuk membuat demokrasi, tentunya versi mereka sendiri. Di jaman Yesus hidup, Imam Kayafas adalah seorang mobster, dengan berbekal imam besar Yahudi, dia bisa menggalang massa meminta Pontius Pilatus menyalibkan Yesus. Di Indonesia sekarang, kasus GKI Yasmin, yang ijin pendirian gerejanya sah dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, tapi gerejanya tetap saja masih di segel. Jemaatnya masih tidak boleh beribadah. Ini juga akibat mobster.

Masih banyak kasus lain, yang sudah menyandung dan "menyalibkan" banyak orang dan mengkhianati harkat agama untuk menjadikan manusia lebih manusiawi, terutama di negeri yang serba majemuk seperti Indonesia. Kelompok "Iman Kayafas" seolah bangkit lagi di Negeri ini.

***Chris Poerba**, Peneliti Lepas & bergiat di ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).*

TUHAN MILIK PRIBADI

Oleh Donny Anggoro

Agama memang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi agama bisa menjadi sumber perdamaian dan merajut persaudaraan, akan tetapi di pihak lain agama juga bisa menginspirasi pemeluknya untuk melakukan kejahatan, kekerasan, bahkan terorisme. Hans Kung, profesor ecumenical theology di Universitas Tubingen, Jerman pernah merumuskan agama sebagai sumber malapetaka paling kejam dalam sejarah kemanusiaan. Salah satu bukunya Christianity and the World Religion: Paths of Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism (Doubleday, 1986) menggambarkan dengan getir bahwa "rasa fanatik yang terbesar dan kebijakan politik yang kejam terinspirasi dan dilegitimasi oleh agama".

Lebih lanjut, Sumanto Al Qurtuby dalam Pluralisme, Dialog, dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia (Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi, ICRP&Buku Kompas, 2009) menyatakan bahwa agama bisa berperan sebagai "faktor pembelah" dalam beberapa kasus-kasus tragis dewasa ini yang terjadi di Palestina, Israel, Sudan, Kashmir, Irlandia Utara bahkan juga di Indonesia sendiri seperti di Ambon dan Poso. Agama menjadi "sumber konflik" yang memilukan. Belum termasuk sejarah gelap "perang agama" masa lalu yang terjadi dalam tradisi Islam, Kristen, Yahudi, dan agama-agama besar lain.

Berbagai contoh yang telah terjadi kekerasan atas nama agama membuktikan bahwa masalah kebebasan beragama dan perdamaian seperti

di negara-negara lain bahkan Indonesia sendiri memang sedang dalam tahap memprihatinkan. Belum "keprihatinan" pemerintah yang tercermin melalui pola kerja para pejabatnya tentang masalah ini seperti hanya di bibir saja.

Ajaran kebaikan dalam agama seolah pemanis semata, karena sedari awal sampai sekarang pada praktiknya ajaran agama di sekolah-sekolah maupun tempat lain lebih kepada melulu hanya mengajarkan ketaatan cara berdoa , bukan mengamalkan ajaran dengan tindakan nyata, sehingga hasilnya seperti selalu tak siap berhadapan dengan orang yang keyakinannya berbeda. Dalam buku karya Benny Susetyo, Pr., Politik Pendidikan Penguasa (LKiS, 2005) dijelaskan tekanan pengajaran agama di sekolah kebanyakan mendidik orang untuk to have religion bukannya pada to be religious. Pendidikan agama terkesan membuat orang jadi suci dengan begitu taatnya pada aturan agama sampai sekecilnya walau tak disadari malah berakibat kurangnya perhatian pada masalah sosial. Beban administrasi satuan pelajaran yang berat meskipun Indonesia cukup kaya dengan tradisi lokal, jadi mandeg dalam pelaksanaan sehingga menyuburkan moralitas semu dengan begitu memuncaknya kegiatan agama beserta ritualnya.

Hasilnya cukup jelas. Selain penganutnya menjadi munafik, tokoh agama sendiri pun lantas rentan terhadap godaan materi dengan praktik korupsi donatur kaya yang dihormati organisasi keagamaan. Agama menjadi cukup sibuk menambah jumlah pengikut daripada meningkatkan kualitas keimanan. Filantropi keagamaan di negeri ini jadi lebih mencorong secara pragmatis sehingga praktik kehidupan beragama sangat mudah sekali disetir untuk kepentingan politik. Misalnya, ramai-ramai kiai ikut partai politik seperti yang pernah didedahkan dalam Perselingkuhan Kiai dengan Kekuasaan (Dr. Endang Turmudi, LKiS, 2004). Wajah memang bermanis-manis tapi makna ibadat di hati sebenarnya sudah meninggalkan rasa spiritualnya dengan hanya menjadi tindakan ritual semata.

Mudah Disetir

Budayawan Remmy Sylado berpendapat terkait dengan masalah kekerasan atas agama, ia mengatakan biang keladinya karena memang urusan ekonomi belum selesai. Dan fatalnya ketika ternyata "urusan perut" memang belum selesai, pikiran lalu mudah disetir hingga begitu mudah diracuni pemikiran: "hancurkan yang lain demi Tuhanmu!".

Remmy Silado berpendapat biang keladinya adalah karena "masalah ekonomi belum selesai". Itu betul. Tapi, ada satu hal lain yang tak kalah penting, yaitu ajaran agama yang sudah ada di sini seperti tak berpijak di bumi dengan tidak mengikuti gejolak pertumbuhan sosial-ekonomi yang ada, sehingga menyebabkan kerusakan moral yang melanda berbagai lini. Sekedar contoh perbuatan korupsi pun seolah menjadi pembenaran ketika hasilnya dialokasikan untuk pembangunan rumah ibadah yang megah atau naik haji. Jika digabungkan dengan pendapat Remmy (urusan perut belum selesai) maka klop sudah kekacauan atas nama agama di negeri ini, sehingga kita tumbuh menjadi bangsa yang munafik.

Memang agama memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, tapi yang sering terjadi di zaman kini adalah terlalu banyaknya aspek agama tertentu dimasukkan

sehingga yang terjadi kekacauan. Negara kita sejak dulu memang berkonsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" berdasarkan asas Pancasila. Tapi kondisinya sudah berubah jauh dari konsep tersebut jika mengamati kondisi belakangan ini dengan embel-embel agama akibatnya semakin mengkhawatirkan.

Hal ini semakin keruh karena ketika memang urusan perut belum selesai, agama menjadi semacam "candu". Hanya sayangnya bukan "candu" yang baik, melainkan buruk apalagi di sini banyak orang-orang lapar yang frustrasi mudah disetir masuk agama tertentu lantaran dalam setiap agama pula yang penting bukan mengamalkan ajarannya, melainkan bagaimana memperbanyak jumlah umat seperti contoh yang pernah terjadi di Filipina pada tahun 1986 dengan diawali revolusi people power.

Kala itu yang terjadi, tulis Melba Padilla Maggay, seorang antropolog sosial dalam bukunya Transformasi Masyarakat, Refleksi Keterlibatan Sosial Kristen (Cultivate Publishing, 2004) peran Kristen yang diwakili oleh institusi gereja terjebak antara dualisme pekabaran Injil dan aksi sosial. Kedua peran ini seharusnya ditempatkan dan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, bukannya berjalan sendiri-sendiri sehingga gereja dan kelompok-kelompok Kristen sulit untuk terbuka terhadap kritik, apalagi paham terhadap usaha-usaha perubahan yang dilakukan kelompok lain.

Masih dalam buku yang sama Maggay menulis, kala itu peran sebagai pekabaran Injil ini kemudian tergeser ke dalam masalah bagaimana menambah dan mempertahankan jumlah anggota serta mendapatkan dana yang lebih banyak. Arah persaingan berubah dari mengejar kualitas ke mengejar kuantitas. Merujuk kejadian di Filipina, pertumbuhan jumlah orang Kristen di sana melalui sebuah gerakan memang sungguh luar biasa namun hasilnya ternyata tidak meningkatkan keadilan dan kebenaran. Hal demikian dapat disimpulkan bahwa kekristenan dalam seseorang tetap saja kerdil (kalau di Indonesia, keIslaman) karena ia tak tergerak pada implikasi sosial iman yang lebih jauh walau semula (atau pernah) mengalami pengalaman iman yang menyelamatkan. Penambahan jumlah orang Kristen akan peningkatan keadilan masyarakat nyatanya tak pernah terbukti. Maggay memberikan contoh, kebangkitan rohani

di Filipina yang dipublikasikan secara luas pada kenyataannya belum menunjukkan kontribusi yang berarti pada kemajuan keadilan.

Hal demikian mirip dengan yang terjadi di Indonesia ketika media massa banyak mempublikasikan kegiatan rohani dengan sering ditampilkannya tokoh-tokoh tertentu bahkan selebritis mengenakan simbol- simbol agama Islam dengan maksud "menambah jumlah umat" ternyata semakin "memperkuat" asumsi yang keliru bahwa "banyaknya kegiatan agama dan khotbah tentang kasih mampu menghancurkan struktur ketidakadilan".

Belum ditambah dengan kondisi masyarakat dunia modern dewasa ini yang semakin menunjukkan banyaknya sikap skeptis (ragu) terhadap keyakinan dan agamanya sebagai sumber kebenaran mutlak, maka klop sudah biang keladinya adalah "sosok" ajaran agama yang tak mampu bergerak sesuai zaman akibat ulah pemuka dan penganutnya yang konservatif sehingga "kebal" kritik dan bisa disetir ke sana kemari asal menguntungkan buat agamanya sendiri.

Mungkin konsep sekularisme adalah tepat jika diterapkan di Indonesia karena apa yang terjadi selain kekerasan atas nama agama, pelarangan berdirinya beberapa tempat-tempat ibadah sampai berlakunya Perda Syariah, menunjukkan Indonesia memang sedang dalam kondisi gawat karena ulah orang-orang yang "mengaku" beragama.

Sekularisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Adalah tepat karena pada hakekatnya keyakinan terhadap agama tertentu atau Tuhan masing-masing orang berbeda, oleh karena itu agama dikembalikan lagi pada mereka sebagai "milik pribadi" sehingga tak boleh ada campur tangan pihak lain, bahkan negara sekalipun.

Konsep sekularisme paling tidak dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan, karena konsep ini menyediakan sebuah kerangka yang netral dalam masalah kepercayaan dengan tidak meng-anak-emas-kan sebuah agama tertentu (agama mayoritas). Jika paham sekularisme kelak diterapkan di Indonesia sehingga masalah keyakinan pada agama tertentu bukan menjadi persoalan, tetapi kembali pada "mutu" sumber daya manusia itu sendiri dalam melakukan hal apapun, termasuk membuat kebijakan negara.

Mau tahu apa akibatnya jika kita tak terlalu mencampuradukkan soal agama? Ini sekedar contoh yang pernah terjadi di sini walau dulu Indonesia tak berkonsep sekularisme, namun paling tidak menunjukkan sedikit bukti bahwa jika agama tak bercampur baur dapat menunjukkan kualitas: pada tanggal 3 Juli 1947, Amir Sjarifuddin, seorang pemeluk Kristen yang selalu membawa bibel kecil di sakunya, diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia. Contoh lain pada tahun 1950, tokoh Islam Mohamad Natsir menjadi Perdana Menteri dengan 40 persen menterinya beragama non-Islam. Dalam Pemilihan Umum tahun 1955, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia internasional dengan berhasilnya pemilu paling demokratis dengan menghasilkan golongan nasionalis, Islam modern, Islam tradisional, komunis, sosialis, Katolik dan Protestan yang muncul sebagai pemenang.

Kala itu Indonesia dijuluki sebagai negara

demokrasi terbesar ketiga di dunia pada tahun 1955. Meskipun antara tahun 1959 ada yang namanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang praktiknya "mendewakan" Presiden Soekarno sampai 1999, julukan itu tak disandang lagi, hingga Presiden BJ Habibie mengadakan pemilu yang demokratis tahun 1999. Sejak itu julukan tersebut kembali menjadi milik Indonesia. Predikat itu lebih melekat ketika Presiden Megawati Soekarnoputri yang dengan gemilang mengadakan pemilihan presiden secara langsung, bersih dan jujur pada tahun 2004.

Milik Pribadi

Seyogyanya konsep agama atau Tuhan dikembalikan saja ke individu masing-masing dan menjadi milik pribadi. Distorsi maupun penyimpangan agama pun bisa diminimalisir karena misalkan terjadi kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan bukan dari agama si pelanggar maupun yang memberi sanksi. Kesalahan yang terjadi baiklah menjadi tanggung jawab pribadi antara si pelaku dengan Tuhannya sendiri setelah dikenakan sanksi hukum.

Ingatlah, pada hakekatnya Indonesia dibentuk atas usaha semua golongan dan pemeluk agama yang ada. Tak ada keistimewaan kepada satu kelompok agama tertentu dalam konstitusinya, meski jumlah pemeluk agama Islam di sini kenyataannya terbanyak dan juga terbesar di dunia.

Pertanyaan mengusik, bukankah konsep dan agama yang kita kenal bikinan manusia juga? Kalau bukan buatan manusia kenapa ada banyak nama "hanya" untuk menyebut Tuhan sehingga sempat muncul tulisan di kaos produksi sebuah lembaga interfaith (lintas iman) Dian-Interfidei dari Yogyakarta: "Tuhan, Agamamu Apa?"

Jadi, mulai dari sekarang kembalikan agama dan Tuhan menjadi milik pribadi!*

Tebet, Januari 2012.

Donny Anggoro: *pernah aktif sebagai redaktur/jurnalis majalah interfaith Majemuk terbitan ICRP (Indonesian Conference Religion & Peace) tahun 2007-2010.*

APA KATA MEREKA ?

Pemisahan agama dari pemerintahan, yang juga dikenal dengan sekulerisme, seringkali dicurigai.
"Bagaimana Negara bisa menjaga moral rakyatnya tanpa agama?", inilah pertanyaan yang sering muncul.
Apa pendapat para pakar tentang hal ini?

"Bagaimana Negara bisa menjaga moral rakyatnya tanpa agama terlibat dalam sistemnya?", ini adalah pertanyaan klasik dari masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pencerahan mengenai apa itu Negara dan hak-hak rakyat. Dapat dimaklumi karena ribuan tahun negeri ini hanya berhadapan dengan raja dan monarki dan baru belasan tahun meniti demokrasi.

Negara tidak perlu menjaga moral rakyatnya, itu urusan pribadi masing-masing. Negara hanya perlu menjaga ketertiban umum dan hak azasi warganegara. Banyak orang menganggap Negara harus mengatur moral warganya, memang itu tinggalan tugas 'raja' dari masa lalu, padahal yang diperlukan dulu dan sekarang sama saja yaitu ketertiban umum. Dahulu, memang hak azasi manusia seringkali menjadi privelese para bangsawan dan keraton. Tapi, sekarang menjadi hak semua orang. Sayangnya, banyak penerapan agama yang masih sangat terpengaruh dengan pemikiran monarki yang telah terbukti gagal, tapi diusung kembali dengan alasan revivalisme agama, padahal tujuan bawah sadarnya hanyalah kekuasaan. Negara yang tak mengurusi agama, contohnya Negara-Negara Nordic (Denmark, Swedia, Finlandia), terbukti jauh lebih aman dan sejahtera ketimbang Negara yang mengurusi agama (moral) rakyatnya."

- **Basri Hasan**, Insinyur yang aktif dalam politik sejak 1997, mendirikan beberapa grup diskusi di Facebook, antara lain Forum Konstitusi Negara Sejahtera Indonesia.

"Bila agama diatur oleh Negara seringkali hanya menimbulkan salah kaprah, kepentingan sekelompok manusia, dan bahkan diskriminasi. Contoh diskriminasi yang diakibatkan oleh tidak adanya pemisahan agama dan negara adalah kolom agama di KTP. Apakah fungsi dicantumkannya agama di KTP? Bahkan hanya ada enam agama yang terdaftar di KTP. Bukankah itu tindakan diskriminatif kepada mereka yang tidak menganut enam agama yang terdaftar? Lebih-lebih lagi,

dengan dicantumkannya kolom agama di KTP akan memungkinkannya tindakan diskriminatif berdasarkan agama yang dianut (misalnya di tempat kerja). Sangat mungkin ada perlakuan berbeda setelah orang lain mengetahui agama anda. Agama yang seharusnya pilihan pribadi individu menjadi seperti pajangan di depan umum. Selain itu, pernikahan beda agama tidak diijinkan secara hukum. Negara hanya menginginkan pernikahan dengan orang yang seagama.

Namun, bila agama tidak disertakan dalam sistem kenegaraan, apa jadinya? Dalam negara sekuler, negara membebaskan pilihan bermoral rakyatnya. Masyarakat boleh bermoral sesuai dengan ajaran agama yang dianut , humanisme, bahkan masyarakat boleh bermoral sesuai dengan pemikiran rasional tanpa ajaran agama sekalipun. Negara tidak mengurusi pilihan agama atau kepercayaan rakyat dan hanya turun tangan pada saat tindakan masyarakat di dalam kerangka moral tertentu merugikan orang lain.

Sebenarnya, manusia bisa bermoral terlepas dari ajaran kepercayaan tertentu karena otak kita secara alami memiliki kemampuan untuk bermoral. Otak manusia mempunyai neuron cermin (mirror neuron) yang memungkinkan kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, termasuk penderitaan mereka. Ini yang kita namakan dengan empati. Empati inilah yang harus terus kita asah, bukan membunuhnya dengan dalih agama".

- **Difa Kusumadewi Priraharjo,** pendiri organisasi Minerva.

"Sistem politik yang terbaik, sejauh ini, ialah sistem sekuler. Inilah sistem yang paling mungkin diterapkan dalam masyarakat yang majemuk. Yang dimaksud dengan sistem sekuler di sini bukan sistem yang anti-agama, sebagaimana sering dikemukakan oleh para penentang sekulerisme, tetapi sistem yang secara adil memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Dalam masyarakat seperti ini, masing-masing golongan atau individu bisa menganut secara bebas sistem moral yang diyakini. Sistem moral dalam masyarakat tak bisa diseragamkan. Penyeragaman semacam itu tak bisa diterima dalam masyarakat yang majemuk dan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena akan memaksa seseorang mengikuti sistem moral yang tidak dia percayai."

- **Ulil Abshar Abdalla,** Jaringan Islam Liberal.

"Negara bisa disebut sebagai organisasi besar yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan, dimana dalam menjalankan fungsi kekuasaan memiliki sifat mengatur dan memaksa warganya melalui Undang-undang berdasarkan yurisdiksinya. Di dalam Karena itu, Negara harus bisa mengelola kebaragaman yang tumbuh secara adil, berkemanusiaan tinggi, menyayangi rakyatnya.

Agama adalah pengalaman manusia mencari bentuk spiritualitas dalam makna ketenangan jiwa, kedamaian hati, sebagai kontemplasi kasih sayang terhadap alam dan sesama manusia. Selain itu, agama seharusnya menjadi suatu metode pencapaian spiritualitas dalam meninggikan kemanusiaan.

Bila Negara ikut campur dalam pencarian spiritual ini, yang seringkali terjadi adalah penyalahgunaan agama sebagai alat intervensi keputusan politik-kekuasaan. Yang membahayakan lagi adalah, akan muncul peraturan formal satu ajaran agama (Perda-perda khusus), yang kesemuanya hanya menyuburkan fundamentalisme agama dan diskriminasi terhadap agama-agama lainnya. Karena itulah, saya ingin mengutip Ghazi Mustafa Kemal Pasha (Presiden Turki, 1923-1938): Jangan marah, kita bukan melempar agama kita, kita cuma menyerahkan agama kembali ke tangan rakyat kembali, lepas dari urusan Negara supaya agama dapat menjadi subur"

- **Asri Vidya Dewi,** Praktisi Hukum (advokat) dan Ketua Umum Perguruan Seni Beladiri Wushu dan Tai chi "Cakra Vidya"

PERANCIS & BURQA

//Ardy Kresna Crenata

> “Para penentang sekulerisme kerap menengok sekulerisme Perancis untuk meneguhkan pandangan mereka bahwa sekulerisme itu buruk. Salah satu yang mereka soroti adalah pelarangan pemakaian jilbab atau burqa. Bagi pemeritah Perancis, mengenakan pakaian seperti itu adalah aksi berlebihan dalam menunjukkan identitas keagamaan, juga wujud kemunduran pola pikir perempuan yang semestinya membebaskan diri dari segala bentuk pengekangan.”

Perancis melarang jilbab dan burqa!

Hal ini sempat menjadi berita cukup santer di Indonesia. Para penentang sekulerisme kerap menengok sekulerisme Perancis untuk meneguhkan pandangan mereka bahwa sekulerisme itu buruk. Sebenarnya, bukan jilbab atau burqa saja yang dilarang, seperti yang telah digembar-gemborkan kebanyakan media massa di sini. Sekulerisme di negeri "romantis" ini juga melarang pemeluk agama-agama lain untuk menunjukkan identitas keagamaan di ruang publik. Para pemeluk agama Kristen, misalnya, tidak bisa mengenakan kalung salib. Sedangkan mereka yang Yahudi tidak diijinkan mengenakan topi bundar khas Yahudi.

Sistem sekulerisme Perancis yang dikenal juga dengan Laisisme ini memang bisa dibilang unik. Tidak banyak sebenarnya negara sekuler yang menerapkan pelarangan sedemikian. Lalu, apa maksud mereka dengan pelarangan ini dan apa akibatnya?

Tujuan pemerintah Perancis dengan melarang simbol-simbol keagamaan di ruang publik, barangkali untuk menghormati pemeluk agama lain, atau lebih tepatnya menjaga perasaan pemeluk agama lain.

Sekilas, hal ini tampak sebagai wujud sempurna dari sebuah kesetaraan agama. Namun dari sudut pandang lain, dampaknya justru bisa sebaliknya.

Mengapa ?

Pemisahan antara agama dan pemerintah sudah dimulai sejak tahun 1905. Pada tahun 2004, hal ini dilanjutkan dengan pelarangan adanya penonjolan identitas keagamaan di ruang publik (sekolah, rumah sakit dan gedung-gedung pemerintah). Tujuan pemerintah Perancis barangkali untuk menghormati pemeluk agama lain, atau lebih tepatnya menjaga perasaan pemeluk agama lain.

Sekilas, hal ini tampak adil dan merupakan wujud sempurna dari sebuah kesetaraan agama. Namun dari sudut pandang lain, dampaknya justru bisa sebaliknya.

Ada perbedaan antara sesuatu sebagai simbol dengan sesuatu sebagai tuntutan. Memang, jilbab juga adalah simbol. Dengan mengenakan jilbab, seorang perempuan akan dikenali sebagai pemeluk Islam, dan barangkali ini yang berusaha dicegah Laisisme, sebab paham tersebut menghendaki setiap individu di ruang publik dikenal sebagai semata individu, bukan bagian dari umat tertentu. Namun di sisi lain, bagi sebagian yang meyakininya, mengenakan jilbab adalah juga suatu kewajiban, keharusan, perintah dari Tuhan.

Mereka yang memilih mengenakan jilbab barangkali punya dua alasan. Pertama, mereka takut dikenai hukum Tuhan akibat berbuat dosa (baca: tidak menutupi rambut seperti yang konon diperintahkan Tuhan kepada mereka). Kedua, mereka ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang mereka yakini itu. Di sinilah terjadi semacam pertentangan antara menjaga bias identitas agama di ruang publik dengan kebutuhan rohani seorang pemeluk agama untuk (setidaknya) menyenangkan Tuhannya. Jalan keluar paling ideal untuk mengatasi pertentangan ini, barangkali adalah kompromi. Tapi tampaknya kedua pihak teguh bertahan pada apa yang diyakininya lebih benar.

Apakah keliru jika seorang individu menjaga bias identitas agamanya di ruang publik untuk menghindari terganggunya individu lain? Tentu tidak, sebab itu hal yang baik. Tapi apakah keliru jika seorang individu berusaha patuh-teguh pada titah Tuhannya agar ia merasa Tuhannya senang akan tindakannya itu? Tentu tidak, sebab itu juga hal yang baik. Dua hal, yang kerap kali bertentangan, memiliki nilai kebenaran yang sama. Sekali lagi, ini adalah soal sudut pandang.

Sekulerisme semestinya melindungi hak-hak setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan, baik itu yang mayoritas maupun yang minoritas. Sekulerisme seharusnya memberikan ruang gerak yang sewajarnya bagi tiap-tiap pemeluk agama, selama tidak mengusik atau mengganggu pemeluk agama lain. Sekulerisme yang ideal juga bisa menjadi kontrol terhadap agama, agar ia tetap berada

di posisi yang semestinya, yaitu di ruang-ruang privat. Dan sekulerisme mestinya ada untuk menjaga hubungan yang harmonis antar-pemeluk agama dan kepercayaan. Bila demikian, sekulerisme bisa menjadi solusi dari diskriminasi agama yang masih sering jadi isu hangat di dunia ini.

Maka Laisisme atau sekulerisme Perancis barangkali adalah sebuah keganjilan, sebab ia yang semula bertujuan menjaga hubungan harmonis antar-pemeluk agama dan kepercayaan, kenyataannya malah menciptakan ketegangan dengan menetapkan sesuatu yang hanya terlihat putih di satu sisi, tapi tidak di sisi lain. Terkait pelarangan pemakaian burqa, misalnya, alasan yang dilontarkan pemerintah Perancis adalah untuk membebaskan perempuan dari kekangan, untuk menegakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, untuk kembali menyadarkan perempuan bahwa ia tidak harus sampai sejauh itu menutupi tubuhnya semata untuk menjaga nafsu laki-laki. Padahal di sisi lain, pelarangan pemakaian burqa adalah juga sebuah bentuk pengekangan beribadah, pembatasan hak seorang individu untuk menyenangkan Tuhan yang diyakininya. Jadi, yang mana sesungguhnya yang benar? Mungkin keduanya. Sebab, bagaimanapun, ini hanya permainan sudut pandang.

Tapi dunia tentu butuh solusi. Dua penafsiran yang bertentangan itu tidak mungkin terus-menerus berdiri tanpa suatu saat berdampingan. Yang menjadi pertanyaan adalah: yang mana yang kelak (sedikit) mengalah hingga akhirnya tercapai kata kompromi?

Perancis adalah negara yang sebagian besar penduduknya menganut Katolik Roma. Agama Islam yang belakangan berkembang di negara tersebut, dibawa dan dirintis oleh para imigran yang berasal dari negara-negara bekas jajahannya, seperti Aljazair. Terakit pemakaian burqa, dianggap juga bahwa hal tersebut bisa melukai perasaan para pemeluk Katolik Roma yang telah lebih dulu mendiami Perancis. Hal ini, saya rasa, perlu dicermati.

Sepertinya sudah jadi hukum universal bahwa yang datang belakangan harus menghormati yang datang lebih dulu, bahwa pendatang harus menghormati penduduk setempat. Jika ini yang dilihat, maka argumen tadi sungguh beralasan, sebab bagaimanapun para pemeluk Katolik Roma yang ada di negara itu lebih dulu adalah tuan rumah sedangkan para pemeluk Islam yang datang belakangan adalah tamu. Sederhananya seperti itu. Namun tentu hal tersebut kini sudah tak berlaku lagi, terutama setelah sejarah membuktikan bahwa hampir setiap warga negara di seluruh bumi ini nenek moyangnya adalah pendatang (penjelajahan ke wilayah lain telah dimulai ratusan ribu tahun yang lalu). Setiap pendatang kini telah menjadi warga negara, yang tentunya memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya (baca: tuan rumah). Tak ada lagi tuan rumah tak ada lagi tamu. Yang ada adalah penghuni. Itu saja. Lagipula sekulerisme, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, semestinya melindungi hak-hak kaum minoritas, mereka yang sedikit.

Jika memang seorang pemeluk Katolik Roma (yang dianggap pribumi) merasa tersakiti atau tersinggung melihat seorang pemeluk Islam (pendatang) mengenakan burqa, maka ia selayaknya ditanya apa yang membuatnya merasa seperti itu. Selama si pendatang tidak melakukan tindakan buruk terhadapnya, semestinya itu tak jadi masalah. Seandainya

perasaan tersakiti itu timbul karena kecurigaan yang sangat bahwa si pendatang itu akan melakukan hal buruk terhadapnya, itu pun semestinya dibenahi. Suatu fobia, terhadap apa pun itu, selalu hanya membuat seseorang menilai buruk orang lain, dan itu tentu tidak sehat.

Pertikaian Antar Agama di Indonesia

Di Indonesia hal ini kerap terjadi. Di Bogor, misalnya, upaya mendirikan sebuah gereja di kawasan Yasmin telah nyata terhambat. Alasannya macam-macam dan sangat panjang jika harus ditelusuri satu-satu dan dikemukakan semuanya dalam tulisan ini. Intinya adalah, pendirian sebuah gereja di kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah jadi isu yang sensitif. Ada semacam sentimen anti-gereja (meski istilah ini mungkin terlalu kasar). Dengan berdirinya sebuah gereja di kawasan mereka, dikhawatirkan akan memberikan pengaruh negatif bagi mereka, sebut saja misalnya perpindahan keyakinan atau terganggunya hari Minggu mereka yang semestinya tenang. Pola pikir seperti ini, tentu tidak sehat. Ketakutan berlebihan, kecurigaan berlebihan, hanya akan membuat seseorang terlalu dini menentukan seuatu itu hitam atau putih.

Dari dua kasus tersebut, tampaklah bahwa akar masalah sesungguhnya ternyata bukanlah agama, melainkan ketimpangan hak antara yang banyak dan yang sedikit, yang mayoritas dengan yang minoritas, yang menghuni lebih dulu dengan yang datang belakangan.

> *"Gereja Yasmin tidak diijinkan pembangunannya oleh Pemkot Bogor. Melalui dua tahap pengadilan, gereja Yasmin akhirnya mendapatkan kepastian hukum dan berhak lanjut dibangun. Namun, sampai saat ini, gereja tersebut masih disegel, dan hak yang diperolehnya susah payah untuk lanjut dibangun belum juga didapatkan."*

Kembali ke soal fenomena burqa di Perancis dan kaitannya dengan Laisisme, terlepas dari masuk akal atau tidaknya argumen pemerintah Perancis. Penetapan hukum untuk melarang pemakaian burqa di negara tersebut terkesan berlebihan. Mereka yang mengenakan burqa toh tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain di sekitarnya dan tidak juga melontarkan ucapan yang menyakiti orang lain. Jika pun ada yang ternyata melakukannya, itu tentu bukan diakibatkan oleh burqa yang ia kenakan, melainkan tindakannya semata sebagai seorang individu yang tak sempurna. Selain itu, adanya indikasi bahwa isu ini dipergunakan untuk mendapatkan dukungan politik pada pemilihan presiden periode berikutnya, semakin menambah kesan negatif yang tampak.

Ketika isu-isu keagamaan dan sosial sudah ditunggangi kepentingan politik, tak bisa dipungkiri, niat murninya akan sungguh terkotori. Contohnya bisa kita simak pada kasus GKI Yasmin.

Melalui dua tahap pengadilan, gereja tersebut akhirnya mendapatkan kepastian hukum bahwa ia berhak lanjut dibangun, bahwa tuduhan-tuduhan yang semula dilontarkan padanya tak terbukti, bahwa pembekuan IMB yang dilakukan Pemkot Bogor tak bisa dibenarkan secara hukum. Putusan pengadilan telah keluar. Hukum sudah berbicara. Perintah untuk melaksanakan putusan tersebut sudah ditegaskan. Namun, sampai saat ini, gereja tersebut masih disegel, dan hak yang diperolehnya susah payah untuk lanjut dibangun belum juga didapatkan. Sikap masyarakat juga tidak bersahabat dan keras kepala, dan tombol eksekusi ada di tangan Pemkot Bogor (Walikota). Keengganan Walikota untuk melaksanakan keputusan pengadilan itu mengindikasikan satu hal: kekhawatirannya kehilangan suara dari mereka yang mayoritas (baca: lebih banyak) pada Pilkada selanjutya. Lagi-lagi, politik.

> *"Dengan paham sekulerisme, pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan praktik keagamaan yang berbeda secara merata. Ormas-ormas yang mengatasnamakan agama tertentu, namun sering kali bertindak anarki akan dibubarkan atau dihukum serius.*
>
> *Dengan menganut sekulerisme, barangkali Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang menghormati kebebasan beragama, dan setiap pemeluk agama akan hidup tenang sebab setiap hak dasarnya dipenuhi dan dijamin."*

Sejenak, mari kita lupakan dulu campur tangan politik, dan kembali bertanya: tepatkah pemberlakuan pelarangan pakaian tertentu seperti jilbab atau niqab atau burqa di ruang-ruang publik, dengan dalih menjaga hubungan harmonis antarpemeluk agama? (Pertanyaan tersebut bisa dibuat lebih universal menjadi: tepatkah pemberlakuan pelarangan simbol-simbol keagamaan di ruang-ruang publik, dengan dalih menjaga hubungan harmonis antarpemeluk agama?)

Untuk bisa menjawabnya dengan baik, barangkali kita perlu melihat sedikit penerapan sekulerisme di negara-negara lain yang berbeda dengan Perancis, sebut saja misalnya Amerika.

Amerika mungkin lebih dikenal dengan liberalismenya, tapi prinsip-prinsip sekulerisme sesungguhnya juga dianutnya. Berbeda dengan di Perancis, sekulerisme di Amerika hanya memisahkan "kedekatan" antara agama dan negara, dan tidak melakukan pelarangan munculnya simbol-simbol keagamaan di ruang-ruang publik. Seseorang mau mengenakan kalung salib, jilbab, burqa, atau apapun itu, pemerintah membebaskan. Tidak ada hukuman seperti denda atau penjara untuk mereka yang melakukannya (baca: menunjukkan identitas keagamaannya di ruang publik), seperti yang terjadi di Perancis. Bukan hanya membebaskan, pemerintah juga melindungi hak-hak tiap pemeluk agama untuk beribadah dan mengembangkan diri.

Seperti halnya Amerika, Indonesia pun negara dengan pemeluk agama yang beragam. Karenanya, barangkali sekulerisme bisa juga menjadi solusi. Di Indonesia sudah sangat sering terjadi diskriminasi agama, baik dalam wujud terang-terangan, frontal, maupun tersembunyi,

subversif. Sebuah gereja di Bogor gagal berdiri sebab diklaim berada di kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim, sementara mesjid bisa dengan mudah berdiri di Medan yang mayoritas penduduknya Kristiani (Protestan). Di kampus-kampus ternama berlabel “nasional” selalu ada mesjid (dalam ukuran besar) namun tak ada gereja atau kapel atau vihara atau kuil. Di televisi banyak sekali diputar film-film dalam negeri yang sifatnya Islami namun sangat jarang yang sifatnya Kristiani atau Buddhis atau yang lainnya. Tidak ada ketentuan tertulis bahwa yang bisa menjadi presiden atau wakil presiden di negeri ini hanya Muslim tapi kenyataannya yang non-Muslim selalu sulit menduduki posisi itu. Di sekolah-sekolah, yang katanya “negeri”, tersedia ruang dan jam untuk Pendidikan Agama Islam tapi tidak pendidikan agama lain. Jika saja, kita berani jujur dan mengakui, kita semua akan berkata: Indonesia bukanlah negara yang menghormati kebebasan beragama, melainkan seolah-olah menghormati.

Seandainya...

Seandainya Indonesia menganut sekulerisme, mungkin keadaannya akan berbeda. Pemerintah tak akan campur tangan dalam hak seorang warga negara untuk memilih agama yang dianutnya, baik itu yang “resmi” ataupun tidak, dan agama akan kehilangan wewenang untuk mengatur hal-hal yang sifatnya publik seperti seni, sastra, atau budaya. Dengan paham sekulerisme, pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan praktik keagamaan yang berbeda secara sama, merata, dan ormas-ormas yang mengatasnamakan agama tertentu namun sering kali bertindak anarki akan dibubarkan atau dihukum serius. Dengan menganut sekulerisme, barangkali Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang menghormati kebebasan beragama, dan setiap pemeluk agama akan hidup tenang sebab setiap hak dasarnya dipenuhi dan dijamin. Sekulerisme, bisa dirujuk sebagai solusi strategis bagi negeri yang tengah belajar menerima keberagaman ini.

Perlu diingat bahwa sekulerisme tidak menuntut suatu negara untuk melupakan atau mengabaikan agama, melainkan hanya menempatkan agama di ruang-ruang privat, bukan publik. Inilah yang sering disalahartikan oleh para penentang sekulerisme. Mereka seolah beranggapan bahwa semua sekulerisme adalah sama. Padahal, jika di Perancis diberlakukan pelarangan simbol-simbol keagamaan di ruang publik (seperti burqa); di Inggris, Jerman, Amerika dan Kanada tidak. Jika di mata mereka sekulerisme ala Perancis itu buruk, diksriminatif, dan gagal, maka semestinya sekulerisme ala Inggris, Jerman, Amerika dan Kanada bernilai lain. Kebebasan beragama, kebebasan menunjukkan identitas, dan pemerataan hak kepada setiap pemeluk agama, itu lah yang sangat negeri ini butuhkan sejak lama. Tidak ada salahnya kita mencontoh beberapa Negara lain dalam hal ini. Yang jadi masalah adalah, banyak orang di negeri ini yang anti-Barat.

Ardy Kresna Crenata, *penyair, cerpenis, bergiat di Komunitas Wahana Telisik Seni-Sastra, sebuah komunitas yang mewadahi berbagai disiplin seni di kampus IPB.*

FREEMASON & SEKULERISME DI NUSANTARA

Julia Maria van Tiel

Terdapat dua sistem negara yang utama di dunia, sekuler atau agama. Indonesia adalah negara Pancasila, kompromi antara sekuler dan agama. Sejarah penyusunan UUD 45 dan filosofinya, hasil antara kelompok nasionalis pengusung sekulerisme dan kelompok agama, telah menyepakati bahwa kita berada di tengah, bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Namun bagaimana sejarahnya sehingga para politikus sebelum kemerdekaan mempunyai paham sekulerisme. Bagaimana Belanda mengembangkan sekulerisme itu di Nusantara?

Sejarah panjang masuknya sekulerisme di bawah pemerintahan kolonial Belanda, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Freemasonry (Vrijmetselarij) yang awalnya didirikan oleh personil VOC, Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783), tahun 1762 di Batavia. Ayah JCM Radermacher, seorang Grand Master Freemason dari Grand Lodge Nederland di Den Haag. Semula anggotanya hanyalah personil VOC, di akhir abad 18 organisasi ini juga terbuka bagi orang-orang dari pemerintahan kolonial Belanda, misalnya Gubernur Jenderal dan Asisten Gubernur Jenderal. Lodge Freemason kemudian juga dibuka di Semarang dan Surabaya dengan anggotanya beragam profesi, ambtenaren, polisi, militer, dan pedagang.

Periode berikutnya diikuti berbagai petinggi pribumi, raja-raja dan pangeran di Nusantara, bangsawan, dan pedagang China. Pelukis Raden Saleh adalah orang Jawa pertama yang menjadi anggota.

Freemasonry adalah organisasi pengusung filosofi humanisme sekuler, berkebebasan berpikir (freethinker), mengedepankan kebenaran rasional, anti tirani dan anti dogma. Berdiri di Inggris tahun 1717 sebagai akibat adanya tekanan pemerintahan agama di abad bertengahan. Freemasonry menjunjung Ketuhanan (The Great Architect of the Universe), rasionalisme, dan humanisme. Pemikiran sekuler dan berkebebasan berpikir Freemason dipengaruhi Francis Bacon (1561-1626) ahli politik, filosof, dan penulis buku The New Atlantic (1626). The New Atlantic, sebuah buku fiktif tentang negara yang diimpikannya, yaitu negara sekuler yang didukung oleh hal-hal yang saintifik. Rakyatnya diumpamakan tengah membangun Temple of Solomon. Membangun dengan kecerdasan rasional dan ilmiahnya, yaitu dengan ilmu goneometri. Temple of Solomon diibaratkan masyarakat majemuk yang harus dibangun seindah dan sebaik mungkin, yang merupakan tugas dari setiap pekerja disana. Pemikiran Bacon tentang negara sekuler inilah yang kemudian menjadi inspirasi dibangunnya negara Inggris sebagai negara sekuler pertama di dunia guna mengatasi perpecahan dan kemelut akibat kekuasaan agama-agama yang tak pernah berhenti. Inggris memisahkan antara urusan pemerintahan dan urusan agama. Pemikiran Bacon menjadi pencerah (Illuminati) Freemasonry dalam mendidik anggotanya yang diharapkan menularkannya ke orang sekitarnya, anggota keluarga dan orang terdekatnya, terutama tentang arti humanisme sekuler, berkebebasan berpikir (freethinker yaitu rasional dan empirik yang merupakan dasar berpikir ilmiah), anti tirani, dan anti dogma, mempercayai The Architect of the Universe (Tuhan pencipta alam raya), secara sadar dan mandiri menjunjung moral law dan ethic code. Sebagai organisasi persaudaraan, kini diikuti oleh 120 negara dengan lebih dari 6 juta anggota (sebagian besarnya di USA), mempunyai slogan sejak awal: liberty – equality – fraternity (kebebasan – kesetaraan – persaudaraan).

Sekulerisme ajaran Freemason bukan hanya pemahaman dipisahkannya pemerintahan dengan agama saja, namun semua hal-hal yang membutuhkan dukungan rasionalitas dan empirik (hukum positif, sains dan teknologi, kedokteran, pendidikan, dan ekonomi), agama menjadi tanggung jawab pribadi. Dalam mewujudkan humanisme sekulernya, Freemason menerapkannya dalam bentuk mencintai kemanusiaan, toleransi, kesetaraan, dan menghormati sesama. Atas dasar ini Fremason mendorong pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah-sekolah berbasis sekulerisme dimana agama menjadi tanggung jawab keluarga. Freemason juga membangun perpustakaan-perpustakaan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Akhir abad 19 di Nusantara, organisasi Freemasonry berkembang pesat, dan telah mempunyai Lodge (rumah) di kota-kota besar di seluruh Nusantara. Tahun 1926, beberapa Freemason pribumi membangun organisasi Budi Utomo yang mengadopsi sistem politik barat dan humanisme sekuler. Budi Utomo diketuai Dr. Wahidin Soedirohoesodo dan didukung oleh mahasiswa-mahasiswa pribumi. Budi Utomo

cepat berkembang ke segala kota dan didukung elit pribumi, dan bangsawan. Budi Utomo adalah organisasi nasional pertama yang dibangun dan beranggotakan pribumi yang mempunyai tujuan membangun masyarakat terutama dalam bidang pendidikan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam dunia pendidikan, sekulerisme telah berjasa melahirkan ilmuwan sains dan teknologi, rasional, dan empirik, yang mampu membangun budaya baru dan kemajuan di segala bidang.

Dalam perjalanan berikutnya, Budi Utomo justru ditentang Sarekat Islam, organisasi pedagang pribumi yang didukung masyarakat Arab, yang menyebabkan pamor Budi Utomo merosot. Namun jiwa Budi Utomo tetap hidup dan menjadi inspirasi kelompok politikus yang kemudian dikenal sebagai kelompok nasionalis, mereka membangun partai-partai nasionalis Indonesia. Tanggal 20 Mei berdirinya Budi Utomo tetap dikenang sebagai tonggak kebangkitan nasional Indonesia. Sumbangan pemikiran kaum nasionalis inilah bersama kelompok agama yang melahirkan UUD 45 dan Pancasila.

Kembali kepada Pancasila, yang seyogyanya berada di tengah, bukan negara sekuler dan bukan negara agama, pada akhirnya akan koyak jika agama menjadi dominan. Dominasi dapat melalui beragam cara, antara lain mendiskriditkan Freemasonry yang sudah menyebarkan sekulerisme. Pendiskriditan melalui teori konspirasi betapa berbahayanya Freemasonry bagi kehidupan umat manusia, memang sangat marak di negara kita. Begitu banyaknya teori konspirasi, masyarakat tidak tahu lagi inti permasalahan yang sebenarnya, yaitu tentang sekulerisme yang diusung Freemasonry namun ditentang kaum agama. Organisasi Freemason sendiri di Indonesia dibubarkan Sukarno tahun 1962. Walau surat keputusan pembubaran sudah dicabut tahun 2000 oleh Abdurahman Wahid, namun organisasi Freemason belum berdiri lagi, sehingga tidak ada yang melakukan klarifikasi akan ketidakbenaran teori konspirasi yang beredar di masyarakat Indonesia. Juga, tidak ada yang mengoreksi latar belakang dan kenyataan Freemason sebagai sebuah sejarah yang benar dalam perjalanan budaya dan politik di Indonesia. Kini Freemason di Indonesia seringkali dianggap sebagai tempat buang sampah, atau kambing hitam.

Referensi:

Giebels,L (1999): *Soekarno, Nederlandsch Onderdaan, een biografie 1901 – 1950*, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.

Stevens,TH (1994): *Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië*, Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Stilson,HL & Hughan,WJ (1919): *History of the ancient and honorable fraternity of free and accepted Masons and corcodant orders*, The Fraternity Pub. Com, Boston.

Van Sierenberg de Boer (1961): *Maçonnieke Levensbeschouwing*, Uitgevermaatschappaij CAJ van Driehoeck, Bussum.

Van Sande,AWFM & De Haan MJM (2006): *Vrijmetselaren: 250 jaar en meer*, Stichting De Vrijmetselaar, Den Haag.

Julia Maria van Tiel: *Doktor antropologi kesehatan, penulis buku Kebudayaan Orang Menggala dan buku-buku tentang anak berkekhususan, menetap di Belanda.*

SIAPA YANG ATEIS DI INDONESIA?

Oleh Soe Tjen Marching

Awal bulan Januari tahun ini, seperti dilaporkan dalam surat kabar: lelaki bernama Alex Aan ditahan polisi karena tulisannya di Facebook "Tuhan tidak ada". Alex juga sempat mengumumkan bahwa ia tidak percaya malaikat, setan, surga atau neraka. Dan karena itu, ia dikenal sebagai seorang ateis.

Saya tidak tahu apakah Alex telah berbuat hal lain, selain yang sudah disebut oleh koran, sehingga ia menghadapi ancaman 5 tahun penjara. Tapi kasus ini membuat saya bertanya "kenapa ateisme begitu disikapi dengan kecurigaan di Indonesia? Apakah seseorang yang menyatakan bahwa ia tidak percaya pada Tuhan benar-benar menyinggung agama? Apakah hanya ateis yang tidak percaya pada Tuhan? Dan Tuhan yang mana?

Ateis secara umum diartikan sebagai "tidak percaya pada tuhan". Sedangkan, di Indonesia, dikenal semboyan "Tuhan yang maha Esa". Tuhan itu satu. Tapi bila Tuhan itu satu, mengapa titahnya begitu berbeda dari agama satu dan lainnya, dan bahkan bisa bertentangan?

Sebagai contoh, umat Islam memiliki buku suci mereka sendiri dan Allah sendiri, masing-masing terpisah dari orang-orang Kristen. Banyak Muslim dan Kristen akan mempertimbangkan dewa dalam bentuk seekor gajah atau monyet (dewa Hindu Ganesha dan Hanuman) hanyalah mitos. Saya kira, pemeluk agama Hindu tidak

akan senang jika mereka harus menyembah Allah atau Yesus Kristus. Ini berarti bahwa jika Anda meyakini atau memeluk agama tertentu, Anda biasanya akan tidak percaya pada dewa-dewa atau Tuhan lain selain Tuhan agama Anda sendiri. Artinya, orang beragama bisa dianggap ateis (tidak mempercayai) tuhan dan dewa-dewa agama-agama lain.

Bahkan aliran yang berbeda dari agama yang sama dapat memiliki keyakinan yang berbeda. Pertimbangkan dua komunitas utama Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. NU percaya bahwa tahlil (mengucapkan doa untuk orang mati) adalah suatu yang Islami, karena ritual tahlil adalah dzikir (mengingat dan menghormati Allah). Namun, praktik ini dianggap sesat oleh Muhammadiyah. Jadi, pujian untuk Allah bagi suatu aliran bisa dianggap sebaliknya oleh aliran lain.

Berbagai denominasi Kristen juga memiliki perbedaan mereka; Protestan dan Katolik, misalnya. Protestan tidak berdoa kepada Santa Perawan Maria. Alasannya? Mereka percaya bahwa Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya pengantara antara manusia dan Tuhan. Berikut adalah petikan yang sering dikutip mereka: "Karena ada satu Allah, dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus " (1 Timotius 2:5). Protestan biasanya menganggap doa orang-orang Katolik terhadap Bunda Maria sebagai penyembahan berhala.

Di sisi lain, Katolik percaya bahwa karena Tuhan memilih perempuan ini untuk menjadi ibu dari Yesus, ada tempat khusus bagi sang Bunda dalam agama mereka. Karena itu, penghormatan terhadap sang perempuan adalah rasa hormat kepada Allah dan mereka mempunyai berbagai pujian terhadap Maria. Bahkan, dalam doa Rosario, mereka harus mengucapkan berpuluh kali doa "Salam Maria".

Ada lebih banyak lagi perbedaan antara Protestan dan Katolik, salah satu yang penting adalah kepercayaan antara surga dan neraka. Katolik percaya bahwa kebanyakan orang pada akhirnya akan pergi ke surga setelah mati (bahkan beberapa ajaran menyebutkan semua manusia akhirnya akan masuk surga). Namun, mereka yang dianggap belum "layak" untuk langsung menuju ke tempat indah ini karena dosa-dosa mereka, akan dikirim terlebih dahulu ke dalam api penyucian - yaitu, tempat untuk penyiksaan sampai mereka bersih dari kesalahan mereka.

Tetapi, tidak ada api penyucian dalam Protestan. Mereka biasanya percaya bahwa orang akan pergi ke surga atau neraka, tidak ada di antara keduanya. Jadi, dalam agama yang sama pun, Tuhan tampaknya memiliki aturan yang berbeda. Memang, kebiasaan suatu agama atau bahkan aliran dapat dianggap di mata orang lain. Jika kita berbicara tentang agama-agama di dunia, bisa Anda bayangkan perbedaan mereka? Berapa macam surga, neraka dan dewa-dewa yang ada?

Ketika Agama Dianggap Ateis

Beberapa abad yang lalu, Roma menganut paham politeisme (percaya terhadap banyak tuhan), dan pada umumnya cukup toleran terhadap agama-agama lain. Mereka bahkan sering mengadopsi dewa-dewa orang lain. Namun, kepercayaan pada satu Tuhan dianggap aneh bagi penduduk Mediterania kuno. Akibatnya, banyak orang Yunani, Romawi dan Mesir memandang dengan kecurigaan agama baru saat itu, Kristen. Bahkan, tersebar isu

bahkan orang-orang Kristen itu kanibal, karena mereka memakan tubuh Kristus. Dan mereka dianggap "ateis".

Pada 64 M, selama pemerintahan Kaisar Nero (37-68), api mengoyak Roma selama enam hari. Kota Roma hampir hancur. Dalam kemarahan, rakyat menyalahkan Kaisar yang tidak bisa menangani tragedi ini. Nero segera menuding jarinya kepada orang-orang Kristen, untuk mengalihkan kemarahan rakyatnya. Nero memerintahkan beberapa pentolan kelompok "ateis" ini ditangkap.

Orang-orang Kristen yang ditangkap ini, kemudian disiksa untuk menyerahkan nama orang-orang Kristen lainnya. Dan mereka-mereka ini dihukum, antara lain, dengan dijadikan santapan singa, dengan ditonton oleh publik Roma.

Ateis - Berbeda tergantung Waktu dan Tempat

Kristen adalah korban dalam cerita itu, tapi mereka kemudian menjadi para penganiaya di lain waktu. Selama Perang Salib, orang-orang Kristen menyatakan perang terhadap kaum politeis dan Muslim. Intinya adalah, dalam era yang berbeda dan di tempat yang berbeda, berbagai dewa atau tuhan dapat dianggap lebih benar dan asli daripada yang lain.

Yang dianggap sebagai ateis juga dapat bervariasi. Bila dulu, Kristen dianggap ateis oleh para politeis Roma, pada jaman lainnya orang Kristenlah yang menuduh politeis sebagai ateis. Seringkali, kita dapat dianggap ateis oleh orang-orang dengan sistem kepercayaan yang berbeda.

Karena itulah, Stephen Roberts yang mendeklarasikan dirinya sebagai ateis, pernah berkata: "Sebenarnya kita berdua adalah ateis. Aku hanya percaya pada satu tuhan lebih sedikit daripada Anda. "

(Versi yang hampir sama dalam bahasa Inggris telah dimuat di Jakarta Globe).

Soe Tjen Marching: *penulis Mati Bertahun yang Lalu (novel)* dan *Kisah di Balik Pintu.*

SEKULERISASI NEGARA

Oleh
John de Santo

Sekulerisme telah menjadi isu yang semakin aktual dan relevan, di tengah persoalan penting yang menyangkut relasi agama dan Negara. Secara historis sekulerisme berasal dari Eropa. Oleh sejumlah sejarawan Sekulerisme dianggap sebagai salah satu prestasi Revolusi Perancis (1789 – 1799). Ketika itu sekulerisasi dipakai untuk menjelaskan proses peralihan kekayaan gereja kepada putra mahkota atau kepada Negara. Belakangan istilah "sekulerisme" mengacu gerakan kelompok rasionalis di Inggris, pimpinan George Holyoake (1851). Gerakan ini menengarai upaya rasional abad Pencerahan (Enlightenment) untuk menggantikan pandangan mitos agama tentang dunia, dengan pendekatan ilmiah era teknologi industri. Di Eropa, secara tegas hal itu berarti pemisahan ranah politik dari ranah agama.

Sekulerisme kemudian merambat ke Amerika Serikat. Presiden James A Garfield (1831 – 1881) mengeluarkan maklumatnya tentang pemisahan tegas antara gereja dan Negara. Sedemikian tegasnya pemisahan itu sehingga institusi gereja pun tak luput dari pungutan pajak atas properti yang dimilikinya. Kebijakan ini dilakukan atas pertimbangan, jika gereja tidak membayar pajak, maka beban pajaknya akan ditanggung oleh seluruh masyarakat, dan hal ini akan tidak adil.

Melalui sekulerisasi, sektor-sektor masyarakat dipisahkan dari wilayah hegemoni institusi dan simbol-simbol agama. Inilah yang menyebabkan timbulnya ketidaksenangan kalangan agama. Sekulerisasi dianggap sebagai proses desakralisasi terhadap dunia dan kehidupan.

Pemisahan agama dari Negara mengakibatkan

pengurangan peran agama dalam kehidupan masyarakat; orientasi duniawi menggantikan orientasi terhadap wujud adi alami (supernatural) dan kehidupan sesudah mati; pandangan terhadap dunia yang "sakral" dan "misterius" digantikan oleh pandangan bahwa dunia dan masyarakat secara rasional dapat dimanipulasi dan direkayasa; dan pandangan mengenai institusi agama sebagai sebuah tatanan ilahi digantikan oleh padangan bahwa, lembaga agama adalah hasil dari konstruksi peradaban umat manusia.

Sekulerisasi Bahasa Indonesia

Indonesia bukan Negara berdasarkan ideologi agama. Ideologi Negara memang Pancasila dan bukan teokrasi. Namun penempatan sila Ketuhanan sebagai sila pertama menyiratkan Negara berdasarkan teokrasi. Sila Ketuhanan, tidak saja mewadahi semua kepentingan agama mayoritas, tetapi juga merupakan rumusan kompromistik agar agama-agama minoritas mendapatkan tempatnya dalam ideologi Negara, yang disebut Pancasila.

Jadi, meski secara teori, Indonesia bukan Negara berdasarkan agama, demi sebuah kompromi nasional, namun secara praktik, peran agama mewarnai berbagai kebijakan dan perilaku politik di negeri ini. Warna keagamaan justru kian pekat, ketika wilayah-wilayah tertentu mulai memberlakukan Perda Syariah yang diskriminatif. Akibatnya, nasionalisme yang telah dirajut melalui jalan kompromi itu, tersangkal dengan sendirinya.

Reformasi yang diprakarsai oleh gerakan mahasiswa 1998, justru membawa angin segar bagi timbulnya berbagai kritik terhadap ideologi Negara. Kecaman-kecaman itu semakin mendapatkan apresiasi, ketika kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh sebagian besar masyarakat dirasa belum bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam banyak perkara, Negara terlihat kikuk dan tak berdaya. Pemberantasan korupsi ibarat menegakkan benang basah. Reformasi sudah berjalan selama 14 tahun, namun penyelesaian terhadap akar persoalan yang melanggengkan kemiskinan, ketidakadilan dan kebodohan seolah berjalan di tempat.

Salah satu alasan dalam berbagai penundaan masalah sosial ini adalah tidak tegasnya pemisahan antara agama dan Negara. Ketidaktegasan itu justru menciptakan celah di mana politik tak lagi menjadi wilayah hegemoni Negara. Dalam berbagai kebijakan pragmatisnya Negara menjadikan kepentingan agama sebagai acuan.

Sebaliknya, agama sebagai sumber kekuatan moral, malah dikooptasi untuk melegitimasi kebijakan Negara yang cenderung berpihak kepada kepentingan kapitalis dari pada kepentingan rakyat. Peran agama mengalami inflasi akibat intrusi kepentingan Negara yang semakin idektik dengan kekuatan modal. Peristiwa Meuji, Freeport, Bima, di mana rakyat kecil selalu menjadi korban, secara gamblang memperlihatkan kepada siapa Negara berpihak.

Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka tidak mustahil akan semakin menguatnya berbagai pandangan spontan yang eksplosif dan nekat, termasuk pandangan mengenai pergantian ideologi Negara atau pembubaran NKRI. Maka, sebelum meletupnya percikan api yang tak terkendali hingga merambatnya tindakan-tindakan subversif, amuk massa, dan kekacuan, kita perlu mempertimbangkan sekulerisasi Negara sebagai alternatif.

Idealisme Negara Sekuler

Cikal-bakal sekulerisme memang berasal dari Barat, tapi aplikasinya harus bertolak dari prinsip-prinsip universal yang menjadi pengalaman sosial suatu bangsa. Tugas pokok Negara ialah menjamin prinsip yang mengedepankan kebebasan individual, berdasarkan suara hati dan bukan lagi hal-hal teknis ritual keagamaan.

Apabila sekulerisme diterapkan di Indonesia, maka sekulerisme itu tidak akan pernah sama dengan sekulerisme di Eropa. Tujuan dari proses sekulerisasi Negara – katakanlah di Indonesia - ialah supaya setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dan hak-hak dasarnya untuk hidup sejahtera, termasuk hak invidual untuk meyakini atau tidak meyakini sesuatu.

Mahatma Gandhi sendiri sebagai seorang pemimpin besar sekaligus seorang penganut agama Hindu yang taat, menyadari betapa pentingnya pemisahan antara urusan agama dari urusan urusan Negara. "Hanya melalui sekulerisme penghargaan terhadap semua agama dapat terlaksana secara adil", ungkapnya. Begitu pula Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, mengikuti jejak Gandhi dalam upaya membentuk pemerintah India yang sekuler.

Lantas dari manakah proses sekulerisasi dimulai? Secara konseptual sekulerisasi dimulai dari niat baik untuk mengamandemenkan Undang-undang yang memisahkan semua kegiatan Negara dan berbagai kebijakan yang mengatasnamakan Negara dari ranah agama. Dengan demikian, Negara akan berada di atas kepentingan agama dan mengambil jarak terhadap praktik-praktik ritual agama. Yang perlu disadari oleh kalangan yang menolak sekulerisme ialah bahwa Negara sekuler tidak bisa melahirkan sebuah masyarakat sekuler. Sebaliknya, Negara sekuler dapat dibangun dalam sebuah masyarakat non-sekuler.

Negara sekuler akan membantu menempatkan agama di tempat di mana ia seharusnya berada, yakni dalam hati dari rumah setiap warga Negara. Perancis yang terkenal kuat dengan ajaran Katolik dan Turki yang menjadikan Islam dalam jantung kehidupan demokrasinya, sudah lama menerima sekulerisme. Pertanyaan kita, mengapa Negara-negara seperti Kanada, India, Australia, bahkan Singapura menerapkan paham sekuler? Tentu mereka memiliki pertimbangan yang menguntungkan kedaulatan Negara, ketenteraman dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Mengapa demikian? Karena dalam sebuah Negara sekuler, tak akan ada lagi kelompok warga yang menuntut hak dan privilese kelompoknya dengan menyangkal atau mengabaikan hak dan privilese kelompok lain. Tak ada lagi kelompok masyarakat yang menderita pengucilan dan diskriminasi hanya karena agama atau keyakinannya. Dan sebagai warga Negara, setiap orang dapat sepenuhnya menerima hak-hak dasarnya untuk hidup selayaknya sebagai manusia di tempat di mana ia lahir, berkarya, dan meninggal dunia.

Jadi, salah kaprah jika ada yang mengidentikkan sekulerisme dengan ateisme. Kecenderungan untuk memandang agama sebagai hal irasional dan dengan demikian memarjinalkan perannya dalam kehidupan publik, bukan tujuan sekulerisme. Dan hal demikian, hampir tak mungkin terjadi Indonesia, negeri dengan mayoritas penduduk yang masih menempatkan agama sebagai pusat kehidupannya.

John de Santo, *pemerhati wacana pencerdasan bangsa, menetap di Yogyakarta.*

Sonet, Akhir Perjalanan

Sekelebat, dingin Bandung membuatku teringat pada
aroma yang kau hidangkan. Sepanjang jalan Dago, kita
saling menatap dan membiarkan cinta berselingkuh, tanpa
angan-angan yang jauh. Mencintaimu pun hal sementara

dalam hitungan detik yang kian larut di antara dua bibir.
Kita saling berucap dan menampik kenyataan, hujan, dan
pelukan yang begitu hangat itu. Kapanlah kusingkap tabir
yang menyimpan kebohongan, tersembunyi, dan melenakan.

Akan kubuang dua piring steak yang kau hidangkan. Akan
kulenyapkan kenangan yang kau hadirkan. Akan kuhapus
semua ingatan yang telah pintar kau jejalkan.

Seolah-olah kita adalah sepasang burung yang lelah terbang.
Hinggap di dahan pohon dan bersiul bak kutilang, mengenang
segala macam rindu yang pernah bersarang.

Sajak untuk Kenangan

[1]

satu porsi martabak har dan es teh tawar di depan sekolah kita, jalan
jendral sudirman yang memantik perlawanan dari rakyat berbambu runcing,
sudah menjadi sejarah yang terpaksa kita salin
di buku harian

sebab jarak sudah memisahkan kita, di dua pulau yang terapung.
di pulau yang menitiskan raja-raja menjadi patung.

[2]

sebab di museum balaputera dewa, kita tidak menemukan kelaminnya
arca-arca rusak, kolam-kolam yang dulu penuh bulus sudah
tinggal fosil, dan beberapa ensiklopedia dibiarkan nama
terpampang tak berbentuk

kita duduk di taman, satu-satunya tempat yang menyediakan burung-burung
terbang. dan sebuah patung cupid buta sedang kencing berdiri
dan menertawakan kita yang tak kunjung bertukar bibir

[3]

di sisi sungai musi, kita bermain tebak-tebakan, di mana sebenarnya
sriwijaya ditenggelamkan?

ampera yang merah, sungai yang kuning, dan langit yang hitam seperti
sedang ada seseorang yang belajar menggambar dan gagal mewarnai
kita tertawa, menertawakan ia yang mungkin tidak pernah masuk TK.

[4]

aku katakan kepadamu, dompetku tidak setebal diktat para mahasiswa
tidak setebal berkas kumpulan kasus pidana dan perdata yang tak
pernah selesai pada keadilan

daripada kita makan di warung legenda, kita ke jakabaring saja
menemui bapak penjual angkringan yang tabah meneliti minyak jelantah

aku katakan kepadamu, aku tidak suka memakan kembang gula, menonton
kembang api, dan merayu kembang desa. sebab
dadaku terlanjur kembung kempis untuk mengenangmu yang jauh
merajut kata-kata yang lepuh,

dulu.

Ujung Musim Kemarau

Aku tak melihat debu di ujung rambutmu. Bertanya
shampoo apa yang Kau gunakan, membuatku
teringat pada wangi dupa yang dibakar di kelenteng.
Kemarin Kau tengah menenteng seplastik luka,
aku pikir kenangan tak pernah begitu kejam, malam
kehilangan suara jangkrik, hari-hari dipenuhi influenza.
Selamat tinggal, Cinta; Bayangan randu yang meranggas,
seorang gadis duduk di ayunan tua, membiarkan roknya
digeniti angin, tetapi bukan Kau, bukan wangi serupa
yang kucium ketika hujan mulai membunuh dirinya
demi luka yang lain.

Pringadi Abdi Surya. *Dilahirkan di Palembang, 18 Agustus 1988. Terpilih menjadi Duta Bahasa Indonesia tahun 2009. Karya-karyanya tersebar di berbagai media cetak. Buku kumpulan cerpennya berjudul Dongeng Afrizal (Kayla, 2011). Kini sedang menyiapkan novel triloginya Ganesha.*

AKHIR-AKHIR INI, KONFLIK UMAT BERAGAMA SEMAKIN SERING TERJADI

DAN BAGAIMANA REAKSI APARAT TERHADAP KONDISI TERSEBUT?

...ADA YANG BISA KAMI BANTU?

MUSTINYA ADA.

..TEMPAT IBADAH KAMI DITUTUP PAKSA. SAMPEAN KAN TAU KAMI TIDAK MELANGGAR HUKUM. BELAIN KAMI DONG?

HMMM...., ITU RUMIT. SOALNYA URUSAN BEGINIAN KAN BERBAU SARA. JADI KAMI TIDAK BISA BERTINDAK GEGABAH!

..SAMPEAN TAU PERSAMAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PREMAN?

SAMA-SAMA HOBI NARIK PAJAK.

BEDANYA, PREMAN SIAP MENJAMIN KEAMANAN, KALIAN TIDAK!

-2012

DAN ANEHNYA LAGI, BUKANKAH NEGARA KITA PUNYA DEPARTEMEN YANG KHUSUS MENGURUSI AGAMA. TAPI KENAPA RAKYAT MASIH BERMASALAH DENGAN KEMERDEKAAN BERAGAMA?
LANTAS APA KERJAAN DEPARTEMEN ITU?
DEPARTEMEN AGAMA
JANGAN SALAH! KERJAAN KAMI SANGAAT BANYAK. LIHAT TUH!
DAFTAR HAJI (PASTINYA MUSLIM JUGA)
DAFTAR CERAI (MUSLIM)
DAFTAR KAWINAN (MUSLIM)
RP
RP
RP
"SETUMPUK PEKERJAAN" ITU MUNGKIN BELUM CUKUP BIKIN MEREKA SIBUK.
TERBUKTI DEPARTEMEN ITU MASIH SAJA GETOL BEREBUT PROYEK
DEPAG
MUI
SERAHKAN PROYEK STEMPEL HALAL KEPADA KAMI!
JANGAN!! INI SATU-SATUNYA PENGHIDUPAN KAMI!!
..SEMUA ORANG TAU KALIAN DEPARTEMEN PALING KORUP!! KOK MASIH MERASA KURANG SAJA ?!
SESAT!
MURTAD!
KAFIR!
... IRONIS, SAAT UMAT SALING BANTAI ATAS NAMA TUHAN, PARA BIROKRAT AGAMA SIBUK REBUTAN PROYEK

SEPERTI LATAH, BEBERAPA DAERAH BERLOMBA MENGIKUTI TREND INI. PRODUK HUKUM YANG DIJAMIN TIDAK MEMPEDULIKAN EKSISTENSI UMAT MINORITAS.

ITU ADALAH BUKTI BETAPA PEMERINTAH SAAT INI MELUPAKAN SEJARAH. BAHWA SANG BAPAK BANGSA SUATU KALI PERNAH BERKATA;

"..JADI TATKALA AKU BERDIRI DI HADAPAN KHALAYAK RAMAI, DAN MEREKA BERTANYA PADAKU, NEGARA INI NEGARA NASIONAL KAH ATAU NEGARA ISLAM KAH?

JELASLAH SEKARANG. BERDASARKAN KONSTITUSI, PEMERINTAH WAJIB MELINDUNGI HAK SELURUH WARGA NEGARA TERMASUK DALAM BERAGAMA – SEPANJANG TIDAK MELANGGAR HAK SESAMA WARGA NEGARA YANG LAIN.
YANG RUKUN YA..
BERES BOS!
BOS, SAYA INI KAN DARI KALANGAN MAYORITAS. BOLEH DONG IKUTAN BIKIN ATURAN?
ATURAN?
SEPERTI APA MISALNYA
BIASA, LAH.. SEKADAR MEMBATASI RITUAL AGAMA LAIN, MEMPERSULIT IJIN TEMPAT IBADAH MEREKA, JANGAN KASIH TANGGAL MERAH BUAT HARI RAYANYA, ROBOHKAN PATUNG-PATUNG MEREKA KARENA ITU ADALAH BERHALA!
* MEI 2011, PERAYAAN PASKAH DI CIREBON DIBUBARKAN PAKSA OLEH SEKELOMPOK JAMAAH.
BEGINI YA, AKHI..
..BUDAYA BANGSA KITA KAN CINTA HARMONI. HUKUM KITA DIDESAIN UNTUK MENDUKUNG ITU. SEMOGA ANTUM BISA DIAJAK CARA BAIK-BAIK UNTUK MEMATUHINYA.
JIKA TIDAK,..
..ANTUM PIKIR BORGOL DAN PENTUNGAN INI CUMA PROPERTI BUAT JOGET INDIA SAJA?
WAHAI PEMERINTAH,.. KAPANKAH KALIAN BISA SETEGAS INI DALAM MENEGAKKAN KONSTITUSI?
Aji Prasetyo -12
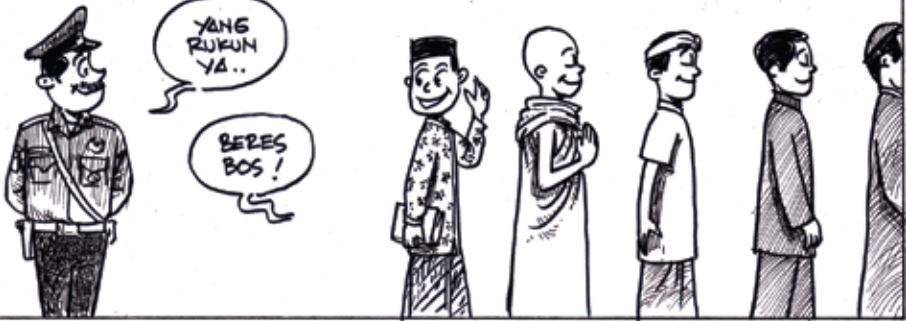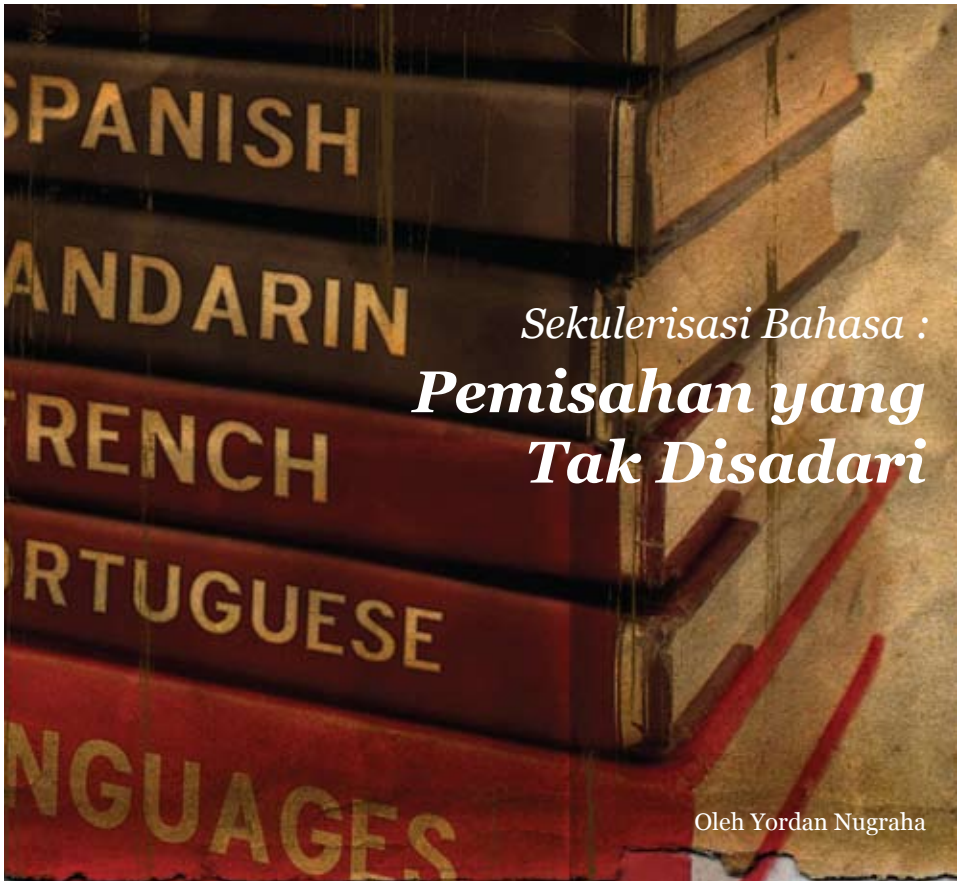
Sekulerisasi Bahasa : ***Pemisahan yang Tak Disadari***

Oleh Yordan Nugraha

Sekulerisasi adalah proses pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dengan kepentingan duniawi. Biasanya istilah ini dilekatkan dengan politik dan kenegaraan; misalnya di Perancis, paham Laicite sangat menekankan penghapusan peran agama dalam pemerintahan dan campur tangan pemerintah dalam dogma agama. Namun, proses sekulerisasi tidak semata-mata berlangsung dalam ranah politik saja. Tanpa disadari, nilai-nilai agama telah merasuki etimologi kata-kata yang biasa kita utarakan. Karenanya, upaya pemisahan nilai-nilai agama dari bahasa, atau dalam kata lain sekulerisasi bahasa, sangat mungkin terjadi.

Menurut Ullman (1963), sekulerisasi bahasa merupakan proses "perluasan semantik" atau "makna." Ia menyatakan bahwa perubahan tersebut merupakan "perubahan semantik dan pengartian ganda." Arti lama suatu kata akan tetap ada, tetapi arti baru juga akan diakui. Bagaimana proses sekulerisasi ini? Apakah benar pendapat Ullman, bahwa sekulerisasi bahasa memperluas maknanya?

Kata yang Berkembang Makna

Contoh sekulerisasi bahasa adalah kata holiday dalam bahasa Inggris. Kata tersebut terdiri dari holy (suci) dan day (hari). Penggunaannya berhubungan erat dengan hari raya Paskah Leech (1974). Akan tetapi, kini kata tersebut maknanya telah bergeser. Artinya sinonim dengan vacation, merujuk pada hari libur. Arti lamanya sendiri juga masih tetap ada, meskipun sangat jarang digunakan. Contoh ekstrem lain adalah penggunaan kata "holocaust". Sebelumnya, istilah itu membawa arti religius yang dalam. Holocaust berasal dari bahasa Yunani, holókauston, yang berarti pengorbanan binatang yang dipersembahkan untuk Tuhan. Seluruh (holos) binatang dibakar (kaustos) sepenuhnya untuk yang di atas. Akan tetapi, setelah peristiwa pembantaian kaum Yahudi oleh Jerman Nazi, istilah tersebut mengalami pergeseran makna. Orang kini mengenal holocaust sebagai pembantaian orang-orang Yahudi pada masa kekuasaan Adolf Hitler di Jerman. Namun, makna lamanya yang religius masih tetap ada di antara kalangan ahli-ahli bahasa Yunani Kuno.

Pertanyaan yang dapat dicetuskan kepada gagasan sekulerisasi bahasa adalah "untuk apa?" dan "kenapa bisa terjadi?" Steve Bruce berpendapat bahwa sekulerisasi menekankan ketiadaan perbedaan dan mendukung sifat egalitarian. Selain itu, beliau juga menyatakan keragaman sebagai salah satu aspek yang "menggerogoti agama." Jadi, jika dihubungkan, akibat adanya keragaman, sekulerisasi bahasa berlangsung untuk menekankan ketiadaan perbedaan, untuk melebur keragaman dalam kuali peleburan.

Untuk lebih memperkuat proposisi tersebut, kita bisa memetik bukti empiris dari peradaban Swahili di Afrika. Peradaban Swahili tinggal di pantai timur Tanzania, Kenya, dan Mozambik. Bahasa mereka, Swahili, merupakan bagian dari rumpun bahasa Bantu. Dengan masuknya Islam, bahasa tersebut mengalami Islamisasi dan Arabisasi. Kosa kata Arab menyerbu masuk. Misalkan, untuk menyebut timur dan barat, peradaban Swahili menggunakan istilah moshariki dan maghraibi, atau untuk malaikat, malaika.

Semuanya berubah begitu Inggris datang dan menjajah. Misionaris-misionaris masuk dan menyebarkan agama Kristen, sehingga pengaruh Islam mengendur. Kepercayaan tradisional Afrika pun kembali mencuat. Ditambah lagi, datangnya penjajah membawa proses pembaratan dan modernisasi. Akibatnya, bahasa Swahili mengalami sekulerisasi, karena penggunaannya tidak terbatas hanya untuk khazanah Islami saja, tetapi juga untuk misa-misa Kristen, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Keragaman yang masuk menuntut bahasa Swahili untuk menjadi sekuler.

Contoh lain yang bisa dipetik adalah bahasa Ibrani. Dalam usaha perwujudan Negara Israel yang dimimpikan Theodore Herlz, Israel memerlukan suatu bahasa sebagai pemersatu diaspora Yahudi yang datang dari berbagai tempat yang beragam (Yahudi Ashkenazi berasal dari Negara-negara Jermanik, Yahudi Sephardic berasal dari Iberia, Yahudi Mizrahi berasal dari Timur Tengah; belum lagi Yahudi lain yang berada di luar pengategorian itu seperti Yahudi Etiopia atau Rusia). Maka mereka memutuskan untuk menetapkan bahasa Ibrani sebagai resmi. Bahasa

ini sebenarnya merupakan bahasa liturgis, yang selama ribuan tahun hanya digunakan untuk mempelajari alkitab saja, dan terbatas pada kaum rabi. Namun, dengan perannya yang baru sebagai bahasa pemersatu para diaspora dari berbagai negeri, bahasa ini pun mengalami sekulerisasi. Bahasa Ibrani modern menjadi terpisah dalam dua ragam: pertama, Ibrani yang masih berpegang pada akar sejarahnya, dan dipelajari dalam sekolah-sekolah agama di luar negeri; kedua, yaitu bahasa Ibrani yang tersekulerisasi dan terpisah dari budaya kunonya. Contoh radikalnya adalah kata חשמל (Chashmal), yang dalam kitab Ezekiel digunakan untuk menjelaskan kereta kuda malaikat, dan kemungkinan berarti semacam api atau petir, tetapi dalam Ibrani modern malah berarti listrik. Makna lamanya yang kental dengan nilai biblikal pun tersingkirkan. Kata chashmal telah tersekulerkan.

Inilah jawaban untuk pertanyaan "untuk apa", yang juga sudah setengah menjawab "kenapa bisa terjadi." Untuk melengkapi, dari kedua contoh tersebut, dapat kita deduksi bahwa keragaman diakibatkan oleh perubahan sosial; maka sekulerisasi bahasa berlangsung karena terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat.

Sekulerisasi Bahasa Indonesia

Tanpa disadari, perubahan sosial yang membawa keragaman telah menyekulerkan bahasa kita. Sebagai contoh, mayoritas penduduk Indonesia pernah menganut agama Hindu. Dalam kepercayaan Hindu yang henoteistik, dewi kesuburan dikenal dengan nama Pertiwi. Maka, dalam pembendaharaan bahasa, kita mengenal ungkapan "bumi pertiwi." Namun, dengan masuknya pengaruh Islam yang kuat dan agama-agama yang lain, orang cenderung melupakan makna lamanya yang mengandung nilai Hindu, dan menggunakan makna baru yang sekuler.

Contoh lain yang bisa digunakan adalah kata "halal" dan "haram". Tentu merupakan sebuah pemahamanumumbahwakeduanyamerupakan istilah Islami, namun maknanya cenderung bergeser saat ini. "Halal" dan "haram" tidak lagi digunakan hanya dalam konteks "menghindari babi, minuman keras, dan lain-lain," tetapi juga dalam semantik yang lain. Misalnya, muncul pernyataan "menghalalkan segala cara." "Halal" dalam konteks itu berarti "membenarkan." Sementara itu, "mengharamkan jalan itu" maknanya cenderung mengarah ke "melarang."

Sekulerisasi bahasa dalam bentuk perluasan makna, cenderung tidak disadari. Namun, jika kita mengusulkan sekulerisasi suatu bahasa, kita malah akan disambut oleh segala macam kecurigaan. Contohnya, dalam biografi Abdurrahman Wahid yang ditulis oleh Greg Barton, disebutkan bahwa "Gus Dur menuai kritik karena mencoba mengganti assalamualaikum dengan salam sekuler selamat pagi."

Sebenarnya, kenapa sekulerisasi ini begitu ditentang? Padahal tanpa disadari sekulerisasi bahasa selalu terjadi dan tak terhindarkan. Penggunaan salam "selamat pagi" pada hakikatnya bukanlah suatu hal yang bermasalah. Namun mengapa menyebarnya pemberitaan bahwa Gus Dur mencoba mengganti "assalamualaikum" itu menuai kritik?

Dalam kasus tersebut, ada upaya untuk memisahkan nilai Islam dari salam setiap pagi; akibatnya, nilai Islam menjadi termarjinalisasi. Berdasarkan kajian antropologi lintas budaya, masyarakat yang termarjinalisasi akan

melancarkan perlawanan ideologi besar-besaran. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang beragama Muslim merasa termarjinalisasi dengan upaya Gus Dur. Maka dari itu sekulerisasi bahasa langsung dipandang dengan buruk dan penuh curiga.

Sekulerisasi bahasa sebenarnya bisa merupakan pemerkaya bahasa dengan adanya perluasan semantik. Hal tersebutlah yang membuat bahasa terus berevolusi dan berdialektika dalam melewati zaman. Tanpanya, bahasa Ibrani tak akan bisa digunakan karena "mati" jika tidak diperkaya lewat sekulerisasi; bahasa Swahili akan ketinggalan zaman dan tak mampu memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat; begitu pula bahasa Indonesia. Memandang sekulerisasi bahasa secara picik bukankah sifat yang tepat karena makna yang lama juga masih tetap ada. Namun, memaksakan sekulerisasi bahasa seperti Gus Dur pun juga tidak tepat. Biarkanlah bahasa tumbuh dan berevolusi sedikit demi sedikit secara alami layaknya bunga; itulah yang memperindah suatu bahasa. Memaksakan sekulerisasi bahasa hanya akan merusak proses tersebut.

Referensi

Bruce, Steve. 2002. *God is Dead: Secularization in the West*.

Chaves, Mark. *Seculaization as Declining Religious Authority*. The University of Notre Dame.

Kantora, Hadassa. *Current trends in the secularization of Hebrew*. Ramatgan: Department of Hebrew and Semitic Languages.

Mazrui, Ali. *The Secularization of an Afro-Islamic Language: Church, State, and Market Place in the Spread of Swahili.*

Yordan Nugraha, *mahasiswa S1 Hukum Internasional dan Eropa di Universitas Groningen, pengurus wikipedia dan salah satu pendiri yayasan Minerva.*

DAFTAR DISTRIBUTOR MAJALAH BHINNEKA

SURABAYA
Lembaga Bhinneka
Jl. Monginsidi 5
Surabaya 60264
(031) 561-2036
(0888) 0483-4837

C2O library
Jl. Dr. Cipto 20
Surabaya 60264
(031) 7752-5216

Freddy Istanto
Fakultas Seni & Desain
Universitas Ciputra
Surabaya 60219

Yuska Harimurti
Jl. Raya Darmo Permai III
Kompl. Plaza Segi 8 Blok
C801-802
Surabaya

Yanuar H.K.
Jl. Lidah Wetan, dan
Jl. Lontar
Surabaya
(0813) 3023-4196
(031) 7116-4660

Tom Saptaatmaja
Jl. Kertajaya Indah 61
Surabaya

Sarjono Sigit
GAYa NUSANTARA
Jl Mojo Kidul 1/11A
Surabaya

Sekolah Mandala
Jl. Putro Agung 2/6
Surabaya
(031) 376-5926

Aditya Nugraha
Perpustakaan UK Petra
Jl. Siwalankerto 121-131
Surabaya

Erin Erniati (Colors Radio)
Jl. Wonokitri Besar 40C
Surabaya
(031) 560-0099

BANDUNG
Febri Qorina (QNET)
Jl. Kol. Ahmad Syam
Ruko Perumahan Ikopin Kav.
A125
Sayang, Jatinangor Sumedang
Jawa Barat 45363

Stefanus Ping Setiadi
Terracota Workshop
Jl. Gandapura No. 71
Bandung, Jawa Barat
(0856) 225-1976

BEKASI
Reynaldo
Jl. Gamprit 1 RT 003 / RW
014 No 73
Jatiwaringin - Pondok Gede
Bekasi 17411
(0817) 587-774

CIANJUR
Pujiono (Bina Insan Center)
Villa Gunung Bakti 19
(Air Isi Ulang Agape)
Jl. Cilengsar - Cipanas
Cianjur 43253

DEPOK
Asyuner Jabar
Jl. Cinere Raya
Ruko Blok D No 7
Cinere, Kota Depok 16514

JAKARTA
Sitok Srengenge
Komunitas Salihara
Jl.Salihara 16
Pasar Minggu
Jaksel 12520
(021) 789 1202

JOMBANG
Aan Anshori
Jl. Wisnu Wardhana 40B
Jombang

LAMONGAN
Bahrul Ulum
Jl. Andan Wangi 161
Tlogoanyar
Lamongan 62218

LUMAJANG
Hari Kurniawan
Jl. Kol. Suruji 86
Lumajang 67313

MAKASSAR
Kantor Sehati
Jl. Kancil Selatan 85
Makassar

MEDAN
Febry (Kantor ASB)
Jl. Vanili Raya 97A
Perumnas Simalingkar
Medan 20141
(0857) 6159 2609

PONTIANAK
Dianna
Kos Ananda Kamar T
A. Yani 1, Gg. Sepakat 2
Blok O
Pontianak

SEMARANG
Heru Emka
Jl. Leduwi Selatan 98
Semarang 50124

Agung Hima
Jl. Gombel Permai 6/107
Semarang
(024) 747-1166
(0812) 2861-7005

SIDOARJO
Cak Irsyad
Sanggar Al-Faz
Besuki Timur, Porong
Sidoarjo
(0813) 3248-2952

SOLO
Gessang
Jl. Cokrobaskoro 201-B
Solo
(0271) 730-676

TUBAN
Lie Kwang Yen
Sekretariat DPRD
Kabupaten Tuban
Jl. Teuku Umar 1A
Tuban 62314

YOGYAKARTA
Jadul Maula (LKiS)
Jalan Pura no.203
Sorowajan, Plumbon
Yogyakarta 55198

Institut Hak Asasi Perempuan
Jalan Nagan Tengah 40A
Yogyakarta 55133
(0274) 382-393

Kusen Alipah Hadi
Yayasan Umar Kayam
Perum Sawit Sari I-3,
Condong Catur, Sleman
Yogyakarta 55283

- Mungkin untuk nomer berikutnya, saya usul dibahas berbagai dimensi multireligiositas dan sinkretisme.
  Dede Oetomo, Surabaya.

- *Topik ini memang akan disertakan pada edisi selanjutnya.*
  Redaksi.

- Apakah undangan menulis untuk majalah Bhinneka terbuka untuk umum? Saya tertarik menulis.
  Raka Ibrahim, Jakarta.

- *Iya, undangan menulis ini terbuka untuk umum.*
  Redaksi.